

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN SERTA
PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN**

(Studi Kasus Pasar Baru Indramayu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Sarjanan (S-1) Program Ilmu
Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra

Oleh

DENI AGUSTINA

NPM. 652010120005



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS WIRALODRA
INDRAMAYU
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN
PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN SERTA
PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO MODERN
(Studi Kasus Pasar Baru Indramayu)**

SKRIPSI

Peneliti


Oleh :

DENI AGUSTINA


NPM : 652010120005

Disetujui Pembimbing
Indramayu, 12 September 2024


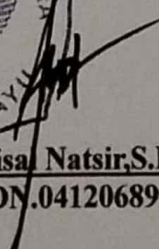
Pembimbing I


(Ilham Setiawan, S.H., M.Si)
NIDN.0407097002

Pembimbing II


(Luthfi Faisal Natsir, S.IP., M.Si)
NIDN.0412068905

**Mengetahui dan Mengesahkan,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Wiralodra**



(Luthfi Faisal Natsir, S.IP., M.Si)
NIDN.041206890

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN/ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun adalah benar-benar hasil pemikiran sendiri tanpa menjiplak atau meniru karya tulis orang lain. Manakala dikemudian hari ternyata skripsi ini adalah jiplakan/tiruan, maka saya bersedia gelar dicabut dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Indramayu, 12 September 2024


1000
METERAI
TEMPEL
E83D4A0018794651
Deni Agustina

652010120005

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
INDRAMAYU NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERARATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DAN
PENATAAN SERTA PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO MODERN**

(Studi Kasus Pasar Baru Indramayu)

Abstrak

Oleh : Deni Agustina

Pasar tradisional merupakan bentuk dari ekonomi kerakyatan yang dampaknya sangat berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia, juga pasar tradisional sangat melekat pada kehidupan masyarakat. Di Kabupaten Indramayu sendiri yaitu Pasar Baru Indramayu kondisinya hingga saat ini kondisi pasar baru Indramayu masih sangat memprihatinkan, kumuh, atap bangunan yang keropos dan rawan ambruk, bocor, banjir ketika hujan karena sistem drainase yang tidak terawat dan banyak kios yang kosong ditinggal pemiliknya karena sepi pembeli. Pemerintah daerah sudah saatnya melakukan perannya untuk mempertahankan eksistensi pasar baru Indramayu agar tetap ada. Tujuan Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu). Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu). Penelitian ini menggunakan metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini Pemerintah Daerah Indramayu telah melaksanakan berbagai upaya untuk mendukung pasar tradisional melalui peraturan dan program-program yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, yang mengatur jarak pembangunan pasar dengan pembangunan fasilitas baru serta meningkatkan kebersihan dan kenyamanan. Namun Pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan signifikan seperti keterbatasan anggaran dan tenaga kerja, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta rendahnya kesadaran pedagang terhadap peraturan.

Kata Kunci : Pasar, Implementasi, Indramayu

**IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF REGIONAL REGULATION OF
INDRAMAYU REGENCY NUMBER 4 OF 2014 ON AMENDMENTS TO
REGIONAL REGULATION NUMBER 7 OF 2011 ON PROTECTION,
EMPOWERMENT OF TRADITIONAL MARKETS AND MANAGEMENT
AND CONTROL OF SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES**

(Case study of Pasar Baru Indramayu)

By: Deni Agustina

Traditional markets are a form of people's economy that has a very influential impact on the economy in Indonesia, and traditional markets are also very attached to people's lives. In Indramayu Regency itself, namely Pasar Baru Indramayu, the condition of the new market in Indramayu is still very concerning, dirty, the roof of the building is porous and prone to collapse, leaking, flooding when it rains because the drainage system is not maintained and many kiosks are empty, abandoned by their owners because there are no buyers. It is time for the local government to play its role to maintain the existence of the new market in Indramayu so that it continues to exist. Research Objectives Implementation of the Policy of Regional Regulation of Indramayu Regency Number 4 of 2014 Concerning Amendments to Regional Regulation Number 7 of 2011 Concerning Protection, Empowerment of Traditional Markets and Arrangement and Control of Shopping Centers and Modern Stores. (Case study at Pasar Baru Indramayu). To describe the Implementation of the Policy of Regional Regulation of Indramayu Regency Number 4 of 2014 Concerning Amendments to Regional Regulation Number 7 of 2011 Concerning Protection, Empowerment of Traditional Markets and Arrangement and Control of Shopping Centers and Modern Stores. (Case study in Pasar Baru Indramayu). This study uses a descriptive research method with a qualitative approach. The results of this study Indramayu Regional Government has implemented various efforts to support traditional markets through regulations and programs contained in Regional Regulation Number 4 of 2014, which regulates the distance between market construction and the construction of new facilities and improves cleanliness and comfort. However, the implementation of this policy faces significant challenges such as limited budget and manpower, lack of coordination between related parties, and low awareness of traders towards regulations.

Keywords: Market, Implementation, Indramayu

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu).

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan usulan penelitian ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Dr.Ismanudin,M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra yang telah memberikan izin dalam penulisan skripsi ini.
2. Ilham Setiawan, S.H., selaku Pembimbing Akademik Pertama yang telah memberikan kelancaran pelayanan dan urusan Akademik, serta membimbing peneliti dalam menggarap tugas akhir.
3. Luthfi Faisal Natsir,S.IP.,M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik Kedua dan Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dalam penulisan tugas akhir ini.
4. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra yang telah membantu pelayanan terbaik selama perkuliahan kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta ,Karim dan Dawinah yang sangat berjasa dalam hidup anaknya, telah membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus sehingga saya tumbuh menjadi anak yang baik dan selalu memberikan yang terbaik untuk anaknya termasuk dalam hal pendidikan sehingga bisa sampai kejenjang saat ini.
7. Seluruh keluarga yang sudah memberikan doa dan dukungan
8. Untuk teman dan sahabat penulis Mba Evah, Dissty, Ofi, Niki, Ayu yang selama ini selalu memberikan saran masukan dan memberikan semangat setiap kali mengerjakan skripsi bersama, terimakasih sudah menemani sampe dititik ini. Serta sahabat yang sejak duduk di bangku SMP Shabbih Zharvaina dan Salsabila Rosmalia Dewi yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
9. Serta untuk seluruh narasumber yang sudah memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian berlangsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
URAT PERNYATAAN KEASLIAN/ORIGINALITAS	i
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah Penelitian	8
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11
2.1 Tinjauan Pustaka.....	11
2.1.1 Implementasi Kebijakan.....	11
2.1.2 Model Implementasi Kebijakan	16
2.1.2.1 Model Implementasi Menurut George C.Edwards. 16	
2.1.2.2 Model Proses Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn	18
2.1.3 Konsep Kebijakan Publik.....	20
2.1.4 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kebijakan.....	21
2.1.4.1 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	21
2.1.4.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.....	22
2.1.5 Pasar	23
2.1.5.1 Konsep dan Definisi Pasar	23
2.1.5.2 Pasar Modern	25
2.1.5.3 Pasar Tradisional	26
2.1.5.4 Jenis-Jenis Pasar Tradisional	27
2.1.5.5 Ciri-ciri Pasar Tradisional	30
2.1.5.6 Komponen Pasar Tradisional.....	30
2.1.6 Penelitian Terdahulu.....	31
2.2 Kerangka Pemikiran	33
2.3 Asumsi Dasar.....	35

2.4 Operasional Variabel.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Tipe Penelitian	38
3.2 Instrumen Penelitian	39
3.3 Unit Analisis dan Key Informan	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5 Teknik Analisis Data.....	41
3.6 Rencana Pengajuan Keabsahan Data.....	42
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian	42
3.7.1 Lokasi Penelitian.....	42
3.7.2 Jadwal Penelitian.....	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian.....	43
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Indramayu	43
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.....	48
4.1.3 Gambaran Umum Pasar Baru Daerah Indramayu.....	55
4.1.4 Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	58
4.2 Pembahasan	60
4.2.1 Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu).....	60
4.2.2 Faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Indramayu nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan No 7 Tahun 11 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.	85
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel 2.2 Operasional Variabel	36
Tabel 3.1 Key Informan	40
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	42
Tabel 4.1 Data Jumlah Pegawai menurut Golongan/Ruang Kepangkatan.....	53
Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	54
Table 4.3 Jumlah Sarana Prasarana di Pasar Baru Indramayu	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu	52
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar merupakan tempat jual beli barang dengan jumlah penjual yang lebih dari satu. Saat ini pasar terbagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pengertian pasar juga dapat dititik beratkan dalam artian ekonomi yaitu transaksi jual beli yang pada dasarnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam persaingan berjualan. Di dalam pasar penjual berhak memutuskan untuk menjual barang atau jasa apapun yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan disitribusikan. Sedangkan pembeli bebas untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya (dalam Rahma 2017).

Pasar Tradisional adalah suatu tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi antara penjual dan pembeli secara langsung. Pasar terdiri dari bangunan yang berbentuk kios, gerai, atau los. Pasar tradisional biasanya menjual kebutuhan sehari-hari, alat elektronik, kain, hasil bumi, seperti sayur, buah, ikan, daging, telur, dll. (Winarno, 2021:50). Pasar Tradisional juga merupakan sebuah pondasi bagi ekonomi masyarakat daerah yang memberikan kontribusi besar bagi keberlangsungan hidup mereka. Sehingga pemerintah harus bijak dalam menangani dan menjaga eksistensi keberadaan Pasar Tradisional. Selain itu

Pasar Tradisional juga memiliki peran koperasi dalam bentuk mall, supermarket minimarket, departement store dan shopping centre dimana pengelolannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tanfab, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label harga yang pasti sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/101/1997.

Pasar Tradisional menyerap 23,4 juta tenaga kerja atau sekitar 21.3% dari total tenaga sewilayah kerja Indonesia. Lebih daripada itu selain untuk kegiatan perekonomian, Pasar Tradisisonal juga biasa digunakan sebagai tempat untuk interaksi sosial yang efektif dan efisien. Banyak hal yang dapat dilakukan di Pasar Tradisional tanpa harus mengundang dan juga mengadakan perjamuan mereka akan datang dengan sendirinya dengan sukarela.

Pasar Tradisional terbentuk secara alamiah karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat, sehingga keberadaan Pasar Tradisional sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu pasar tradisional juga memiliki kelebihan diantaranya yaitu mudah dijangkau semua kalangan, lokasi yang mudah ditemukan, tempat bagi para umkm memulai usahanya, harga yang terjangkau, serta memiliki interaksi sosial yang sangat erat antara pedagang dan juga konsumen.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di pasar tradisional sebagai mata pencaharian utama mereka. Namun di zaman yang semakin berubah dengan cepat ini dan juga kemajuan teknologi yang semakin pesat dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat membuat keberadaan Pasar Tradisional terancam dan menimbulkan dampak negatif bagi keberadaannya. Yaitu dengan adanya pasar modern dan mini market yang saat ini semakin banyak hingga menjangkau pelosok negeri. Sehingga konsumen Pasar Tradisional mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pasar modern muncul dengan konsep yang lebih baik dengan menawarkan kenyamanan dan keamanan berbelanja kepada konsumen. Fasilitas tambahan yang baik membuat pasar modern cepat mengambil hati para konsumen sehingga keberadaan pasar tradisional mulai ditinggalkan. Hal tersebut juga berdampak buruk pada menurunnya pendapatan para pedagang di pasar tradisional. Selain pasar modern yang semakin berkembang, mini market modern pun saat ini juga ikut berkembang pesat, yang awal keberadaannya hanya di pusat kota saja. Saat ini mini market modern sudah menjangkau sebagian besar pelosok negeri. Hal tersebut juga menjadi ancaman bagi eksistensi pasar tradisional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas

mutu pelayanan, dapat digolongkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pemerintah memang memiliki hak untuk memberikan kebijakan yang terbaik untuk mengatur keberadaan antara pasar tradisional dan juga pasar modern. Namun aturan tersebut harus bersifat objektif dan tidak merugikan keduanya, kebijakan yang dapat membuat keduanya berjalan dengan baik untuk pertumbuhan perekonomian. Karena sejatinya pedagang kecil, pedagang besar, pedagang menengah memiliki kesempatan yang sama untuk berusaha. (Rusham, 2016:154).

Melihat permasalahan diatas, seharusnya pemerintah melakukan penataan ruang kota yang dapat memberikan dampak positif bagi seluruh pihak. Pemerintah daerah mengatur kebijakan penataan dengan mengatur jumlah dan jarak keberadaan antara pasar modern dan pasar tradisional, serta mengatur penempatannya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga eksistensi pasar tradisional. (Rusham, 2016:154)

Namun sebenarnya persoalan utama dari merosotnya pasar tradisional bukan hanya dari keberadaan pasar modern dan mini market modern. Terdapat pula masalah internal yang sejak dulu masih belum terselesaikan seperti manajemen pasar yang belum baik, para pedagang nakal yang mendirikan bangunan-bangunan di sekitar pasar secara tidak tertib atau pedagang kaki lima (PKL), minimnya bantuan modal kepada pedagang tradisional. Dan yang kita perlu soroti disini yaitu banyaknya pedagang-pedagang yang tidak tertib di sekitar pasar membuat konsumen di pasar tradisional juga mengalami penurunan, sudah seharusnya pemerintah

setempat melakukan penertiban kepada para pedagang tersebut. Selain itu para pedagang yang tidak tertib itu juga membuat keadaan pasar semakin semrawut dan tidak rapih. Ditambah kondisi bangunan fisik pasar yang tidak terpelihara membuat keadaan pasar tradisional semakin tidak baik.

Pemerintah seharusnya mengambil langkah yang serius dalam melakukan penataan dan perlindungan untuk mempertahankan keberadaan pasar tradisional. Pemerintah juga harus menyadari tentang pentingnya keberadaan pasar tradisional sebagai pusat kegiatan perekonomian yang masih menjadi tujuan utama masyarakat untuk melakukan jual beli. Upaya yang Menjaga eksistensi Pasar Tradisional agar tetap ada dan bermanfaat adalah tugas bersama pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memfasilitasi agar pengunjung pasar tetap dapat merasa nyaman dan juga aman saat melakukan transaksi di Pasar Tradisional sementara masyarakat harus dilakukan sosialisasi dan juga melakukan promosi untuk belanja di pasar tradisional agar Pasar tradisional tetap terjaga eksistensinya.

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Jumlah pasar yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Indramayu kurang lebih terdapat 58 pasar tradisional.

Melihat dari materi diatas, sudah saatnya Pemerintah Daerah Indramayu melakukan upaya untuk melakukan perlindungan,

pemberdayaan, penataan, serta pengendalian agar keberadaan pasar baru Indramayu tetap lestari. Pasar ini seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah karena letaknya yang berada di pusat kota. Pasar Indramayu didirikan pada tahun 1995 silam, sudah 29 tahun berdiri namun hingga saat ini belum pernah dilakukan perbaikan dan rehabilitasi.(Sudedi 2022)

Alasan saya memilih melakukan studi kasus di Pasar Baru Indramayu adalah karena hingga saat ini kondisi pasar baru Indramayu masih sangat memprihatinkan, kumuh, atap bangunan yang keropos dan rawan ambruk, bocor, banjir ketika hujan karena sistem drainase yang tidak terawat dan banyak kios yang kosong ditinggal pemiliknya karena sepi pembeli. Pemerintah daerah sudah saatnya melakukan perannya untuk mempertahankan eksistensi pasar baru Indramayu agar tetap ada. Karena di pasar itu banyak masyarakat yang penghasilan utamanya dari berjualan di pasar tersebut. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat mempertahankan keberadaan pasar tradisional yaitu dengan cara memperbaiki bangunan fisik dan memperbaiki sistem manajemen pasar. Karena dengan memperbaiki bangunan fisik pasar tradisional akan memberikan rasa nyaman dan aman bagi pedagang dan konsumen serta menambah daya tarik pengunjung.

Tidak kalah penting juga untuk melakukan penataan ruang kota yang hendaknya tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi juga harus adanya kebijakan penataan yang mengatur penempatan pasar tradisional dan

pasar modern. Misalnya mengenai berapa jumlah supermarket yang boleh ada di setiap wilayah di satu kota. Lalu berapa jarak yang diperbolehkan dari pasar tradisional jika pengusaha ingin membangun supermarket. Hal tersebut bertujuan untuk mengatasi ancaman menurunnya pendapatan pasar tradisional akibat kepingan pasar modern atau minimarket modern yang tidak terkendali. Sehingga dapat menciptakan persaingan bisnis yang sehat. (Rusham, 2016:154)

Karena pasar tradisional merupakan bentuk dari ekonomi kerakyatan yang dampaknya sangat berpengaruh bagi perekonomian di Indonesia, juga pasar tradisional sangat melekat pada kehidupan masyarakat hingga saat ini sehingga pemerintah wajib untuk melindungi, menata serta memberdayakan pasar tradisional agar eksistensinya tetap terjaga.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, fokus masalah dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Perda Kabupaten Indramayu No 4 Tahun 2014 dalam Pengelolaan Pasar Baru Indramayu, penelitian ini juga berfokus pada penyelesaian masalah-masalah yang ada di Pasar Baru Indramayu dan pengelolaannya untuk menjaga eksistensi Pasar Baru Indramayu agar tetap berjalan dengan baik.

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan fokus masalah dalam penelitian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemerintah daerah Indramayu dalam penerapan implementasi untuk melindungi, memberdayan, mengelola dan menata pasar serta pusat perbelanjaan sesuai Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu).?
2. Bagaimana faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Indramayu nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan No 7 Tahun 11 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pasar Tradisoonal dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah maka dapat ditetapkan tujuan penelitian ini adalah diantaranya :

1. Tujuan Penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu).

2. Untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu)

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis (keilmuan) maupun secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan saran dan juga masukan yang positif bagi pihak yang memiliki wewenang mengenai kepentingan dalam bidang pengelolaan dan pembangunan khususnya kepada dinas Perdagangan Kabupaten Indramayu dalam mengelola Pasar karena dengan dilakukannya pengelolaan yang baik maka akan menghasilkan sesuatu yang baik pula untuk keberlangsungan perekonomian masyarakat Indaramayu.

2. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharpkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan ilmu dan juga menjadi tambahan ilmu pengetahuan tentang sebuah pembelajaran tertentu, manfaat teoritis sendiri yaitu menjelaskan suatu teori yang masih berkaitan dan relevan dengan penelitian secara umum atau tidak sama sekali.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab 1 ini berisi tentang latar belakang, focus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat dan juga sistematika penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Pada BAB II ini Berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, asumsi dan operasional variable.

BAB III : Metode Penelitian. Di bab III ini berisi mengenai tipe penelitian, instrumen penelitian, unit analisis dan keyinforman, teknik pengumpulan data dan rencana pengujian keabsahan data.

BAB VI : Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam bab ini berisi mengenai deskripsi data dari temuan hasil dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini berisi mengenai uraian kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan yang memiliki yang memiliki tujuan untuk mewujudkan target atau cita-cita yang sudah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Implementasi juga memiliki kaitannya dengan berbagai macam tindakan yang dilaksanakan untuk dapat menjalankan program yang telah disusun untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasi kebijakan menurut George C. Edwards dalam (Winarno, 2021:177) Implementasi merupakan salah satu tahap kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika salah satu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu disisi lain jika kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar (2001) dalam (Wahab 2001:68) juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Dalam hal tersebut Mazmanian dan Sebastier mengaiktakn implementasi adalah pelaksanaan kebijakan dasar yang berbentuk undang-undang dan juga bisa berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan Badan Peradilan.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul Implementasi Kebijakan dan Politik, (2002) dalam Harsono (2002:67) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut, implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Solichin Abdul Wahab memberikan pendapat mengenai implementasi dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (2001) dalam (Wahab (2001:65) mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan atau implementasi sebagai berikut , implementasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu

atau pejabat, kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah direncanakan dalam keputusan kebijakan. Sementara itu, Grindle juga memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. (Winarno, 2021:149)

Namun disisi lain Majone dan Wildavsky (2004) dalam Nurdin Usman,(2004:70) mendefinisikan implementasi secara sederhana, dalam pendapatnya Majone dan Wildavsky mengatakan bahwa implementasi merupakan perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Implementasi menurut Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi yaitu apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan yang tujuan dari program dan hasil yang diinginkan oleh pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan) oleh berbagai aktor, khususnya para birokrat yang bertujuan untuk membuat program berjalan. (Winarno, 2021:148)

Van Meter dan Van Horn berpendapat mengenai implemetasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu atau

kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Namun yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan begitu tahap implementasi akan terjadi ketika undang-undang telah ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. (Winarno, 2021:149)

(Anderson, 1990) dalam (Purwanto & Ratih, 2012:22) dalam pemahaman ini, implementasi dimaknai sebagai pengelola hukum (karena kebijakan telah disahkan dalam bentuk hukum) dengan mengerahkan semua sumber daya yang ada agar kebijakan tersebut mampu mencapai atau mewujudkan tujuannya. Grindel (1980 : 6) menyebutkan bahwa implementasi “*establish of govermental activity*”. Sedangkan dunia konsep yang dimaksud disini tersevrin dalam kondisi yang ideal, sesuatu yang direncanakan lalu untuk diwujudkan sebagaimana terformulasikan dalam dokumen kebijakan. Sementara untuk dunia nyata atau realita yaitu dimana masyarakat sebagai

kelompok sasaran dari sebuah kebijakan yang akan diterapkan dan sedang bertarung dengan berbagai macam persoalan sosial, ekonomi, dan politik.

Menurut teori dari Marilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. (Pramono 2020:9)

Keberhasilan implementasi dengan demikian sangat dipengaruhi oleh pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana berbagai elemen tersebut dapat bekerja bersama-sama secara harmonis yang ditandai dengan interaksi antar aktor, kapasitas pelaksana di lapangan, strategi penyampaian informasi atau sosialisasi dan kapasitas organisasi.

Dari beberapa pengertian implementasi yang sudah dijelaskan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang memiliki tujuan untuk dapat mewujudkan cita-cita yang sudah ditetapkan. Implementasi juga berkaitan dengan berbagai tindakan yang dapat dilakukan untuk bisa melaksanakan dan mereliasasikan yang sudah disusun agar tercapainya tujuan dari program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program.

2.1.2 Model Implementasi Kebijakan

2.1.2.1 Model Implementasi Menurut George C. Edwards

Model Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edwards, menurut Edwards studi implementasi adalah hal yang sangat penting bagi ilmu administrasi dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah suatu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, disisi lain jika suatu kebijakan yang sudah direncanakan dengan sangat baik kemungkinan akan mengalami kegagalan jika saja kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. (Winarno, 2021:177)

Edward membuat empat variable yang saling berkaitan untuk menjawab persoalan mengenai implementasi diantaranya yaitu :

1. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Karena menurut Edwards persyaratan

utama untuk pelaksanaan implementasi kebijakan adalah harus mengetahui apa saja yang akan dilakukan. Tentu saja komunikasi yang diberikan harus bersifat akurat dan dapat dipahami.

2. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung menjadi tidak efektif. Dengan begitu sumber-sumber dapat menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan (Sikap Pelaksana)

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi penting bagi pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana kebijakan memiliki respon yang positif terhadap suatu kebijakan tertentu maka hal tersebut merupakan sebuah signal dukungan yang kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan oleh para pembuat rencana awal. Begitupun sebaliknya.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering dan bisa secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

2.1.2.2 Model Proses Implementasi Menurut Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan van Horn menawarkan enam variable yang saling berakitan antara kebijakan dan kinerja. Model ini diungkapkan oleh van Meter dan van Horn, tidak hanya menentukan hubungan-hubungan antara variable bebas dan variable terikat mengenai kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variable-variable bebas. (Winarno, 2021:158) Diantaranya variable-variable tersebut sebagai berikut :

1. Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan kebijakan

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh.

2. Sumber-sumber kebijakan

Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Badan Pelaksana

Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasi banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah memengaruhi capaian kebijakan yang telah direncanakan.

4. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Van Meter dan van Horn telah mengidentifikasi dampak dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam kebijakan. Karena kondisi tersebut memengaruhi dari pengambilan keputusan dalam merencanakan kebijakan.

5. Kecenderungan Pelaksana (Implementors)

Pemahaman pelaksana tentang tujuan umum maupun ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijaksanaan yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan secara menyeluruh.

6. Masalah Kapasitas

Van Meter dan van Horn menyinggung soal kapasitas sebagai faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan. Menurut van Meter dan van Horn, implementasi yang berhasil adalah implementasi yang memiliki fungsi dari kemampuan dalam organisasi

pelaksana untuk melakukan yang telah di rencanakan untuk dikerjakan.

2.1.3 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan istilah berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu "*Policy*". Kebijakan juga didefinisikan sebagai suatu tindakan yang mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan. Laswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai tujuan pencapaian, nilai-nilai dan tindakan yang terarah. (Winarno, 2021:19)

Anderson dalam (Winarno, 2021:21) mendefinisikan kebijakan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Kebijakan publik merupakan proses yang kompleks melibatkan banyak aktor dengan banyak kepentingan. (Winarno, 2021:12)

Anderson juga membuat konsep kebijakan publik yang memiliki implikasi yaitu, yang pertama dalam membicarakan kebijakan publik maka berorientasi pada maksud atau tujuan bukan perilaku yang semena-mena. Kedua, kebijakan adalah arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang tersendiri. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi atau mempromosikan perumahan rakyat dan

bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau negatif.(Winarno, 2021:23)

Robert Eyestone dalam (Winarno, 2021:20) mendefinisikan kebijakan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang luas yaitu kebijakan publik menyangkut banyak hal. Sedangkan Thomas R.Dye dalam (Winarno, 2021:20) mengatakan bahwa kebijakan publik ialah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilaksanakan dan tidak dilaksanakan.

2.1.4 Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Kebijakan

2.1.4.1 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut KBBI mendefinisikan penghambat adalah sebagai penyebab atau karenananya tujuan tidak dapat diwujudkan. Menurut Bambang Sunggomo dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Isi Kebijakan

Implementasi kebijakan bisa saja mengalami kegagalan karena belum jelasnya isi kebijakan. Hal tersebut berarti tujuan kurang terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas atau tiap program kebijakan terlalu biasa atau tidak ada.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran terlibat langsung memiliki informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasinya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4. Pembagian Potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab tidak dapat disesuaikan.

2.1.4.2 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Budi Winarno implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian luas, merupakan : “Alat administrasi hukum dimana berbagai aktgor, irganisasi,

prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno 2002:12) dalam (Panjaitan 2022)

Untuk dapat melakukan implementasi kebijakan yang baik maka diperlukan dukungan dan penerimaan masyarakat, karena apabila anggota masyarakat mengikuti dan menaati suatu kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. (Panjaitan 2022)

2.1.5 Pasar

2.1.5.1 Konsep dan Definisi Pasar

Pasar merupakan sekumpulan orang yang mempunyai suatu keinginan untuk dapat memenuhi kebutuhan, uang untuk belanja serta kemauan untuk membelanjakannya. W.J Stanton dalam (Rusham, 2016:156).

Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual yang terdapat lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Definisi pasar ditekankan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Yang pada dasarnya kegiatan

perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang harusnya untuk diproduksi serta tidak di distribusikan. Sedangkan untuk para pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya belinya. (SANTOSO 2017)

Pasar menurut kajian ilmu ekonomi adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang dan jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Belshaw, Cyril S., dalam (SANTOSO 2017)

Sukaesih (1994) dalam (Rusham, 2016:156) menyatakan bahwa citra pasar dalam arti fisik telah mengalami banyak perubahan dan peningkatan menjadi hal yang menarik seiring dengan kemajuan pembangunan ekonomi. Menarik atau tidaknya sarana tempat untuk berdagang tersebut baik yang dikelola oleh pengelola pasar atau tempat perdagangan dan tidak kalah pentingnya yang dilakukan atau peranan pedagang itu sendiri. Pengelola hanya menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk keperluan pedagang dan pengunjung. Sedangkan para pedagang perlu memperhatikan kelengkapan

barang, penataan barang, kualitas barang, harga barang, kemudahan berbelanja, dan ketepatan ukuran.

2.1.5.2 Pasar Modern

Pasar modern merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta, atau koperasi dalam bentuk mall, supermarket, minimarket, departemen store, dan shopping centre, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja serta adanya manajemen yang berada di satu tangan, memiliki modal yang cukup kuat, dan dilengkapi oleh label harga yang sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/11997.

Dari supermarket kemudian berkembang menjadi hipermarket yang merupakan sebuah toko serba ada dengan kapasitas besar dan biasanya ada unsur modal asing di dalamnya. Supermarket atau hipermarket mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan pasar tradisional. Diantaranya yaitu kerpihan pada pengemasan, barang yang lebih lengkap, kebersihan yang terjaga serta kenyamanan. (Rusham 2016)

Pekembangan pasar modern seperti minimarket, supermarket dan hypermarket akhir-akhir ini telah menggeser peran dari pasar tradisional. Sebagian masyarakat terutama

masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Mereka akan lebih memilih untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan berbelanja di pasar modern. Keberadaan pasar modern dirasa lebih menguntungkan konsumen karena memunculkan berbagai alternatif tempat untuk berbelanja dengan fasilitas yang lebih nyaman dan aman. (DEVY PRAMUDIANA 2017)

2.1.5.3 Pasar Tradisional

Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Pasar tradisional diartikan dengan pasar yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan milih negara dan badan usaha milik daerah yang termasuk kerjasama antara dengan swasta dengan tempat-tempat usaha berupa toko, kios los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swasta, masyarakat, atau koperasi dengan usaha sjala kecil menengah dengan usaha skala kecil, dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar menawar.

Menurut Tambunan (2020) dalam (Ii 2020) Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli sehingga terjadi kegiatan tawar-menawar atas barang yang diinginkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Lebih lanjut. Sedangkan menurut menteri perdagangan

no 70 (2013), menyebutkan bahwa pasar tradisional terdiri atas los, toko dan kios yang dapat disewa oleh pedagang.

Pendapat lain mengenai pasar tradisional dikemukakan oleh Sadilah, dkk (2011) dalam (MRizky 2020) pasar tradisional adalah sebuah tempat terbuka yang terjadi proses tawar menawar. Di pasar tradisional ini para pengunjungnya tidak selalu menjadi pembeli karena dia juga bisa menjadi penjual. Pasar Tradisional bisa digolongkan ke dalam 3 bentuk yakni pasar khusus, pasar berkala, dan pasar harian.

2.1.5.4 Jenis-Jenis Pasar Tradisional

Pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal yaitu :

- a. Menurut jenis kegiatannya, pasar digolongkan menjadi 3 jenis :
 - 1) Pasar eceran yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran
 - 2) Pasar grosir, yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar
 - 3) Pasar induk yaitu pasar yang lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir dan pusat pembelian.

- 4) Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi 5 jenis.
- b. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi 5 jenis
- 1) Pasar Regional, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota bahkan sampai keluar kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - 2) Pasar kota, yaitu pasar yang terletak di lokasi strategi dan luas, bangunan permanen dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota serta barang yang diperjual belikan lengkap.
 - 3) Pasar Wilayah (distrik), yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan cukup lengkap. Pasar ini termasuk pasar eceran.
 - 4) Pasar Lingkungan, yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis, bangunan permanen/semi permanen dan

mempunyai pelayan meliputi pemukiman saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap.

- 5) Pasar Khusus, yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan memiliki kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam barang khusus, seperti pasar hewan, pasar burung, dan pasar ikan.

c. Menurut Status kepemilikannya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis :

- 1) Pasar Pemerintah yaitu pasar yang dikelola dan dikuasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 2) Pasar Swasta yaitu pasar yang dikelola oleh swasta yang memiliki badan hukum dan diizinkan berdiri oleh pemerintah.
- 3) Pasar liar, yaitu pasar yang aktivitasnya diluar pemerintah daerah yang kehadirannya disebabkan oleh kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak dari lokasi keberadaan pasar yang tidak merata, biasanya dikelola oleh perorangan. (Bangswan 2017)

2.1.5.5 Ciri-ciri Pasar Tradisional

- a. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah
- b. Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar merupakan budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara penjual dan pembeli
- c. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama, barang yang dijual oleh pedagang berbeda-beda.
- d. Sebagian besar barang dan jasa yang dijual berasal dari lokal. Biasanya barang yang berasal dari hasil bumi yang dihasilkan di daerah tersebut dan bisa juga dari hasil daerah lain. (Bangswan, 2017:56)

2.1.5.6 Komponen Pasar Tradisional

Pelaku kegiatan

- a. Pedagang
Pedagang pasar merupakan pihak ketiga yang melakukan kegiatan menjual barang atau membeli barang yang pusat kegiatannya berada di pasar.
- b. Pembeli yaitu konsumen pasar yang datang dengan tujuan untuk mendapat apa yang menjadi kebutuhannya dengan harga murah dan dengan pelayanan langsung.
- c. Penunjang. Penunjang pasar yaitu

- 1) Pemerintah sebagai pemberi izin dan beroperasinya pasar
- 2) Swasta pedagang penyewa tempat, pelaksana pembangunan pasar.
- 3) Pengelola pemasaran tempat.
- 4) Pengelola kebersihan, pengelola distribusi barang dan stabilitas harga Bank memperlancar kegiatan ekonomi. (Bangswan 2017)

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Tahun	Teori	Metode	Kesimpulan
1.	Alifia Maulidin. (Maulidin, Marwiyah, and Khoirunnafiyah 2021)	Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Porbolonggo.	2021	Dunn	Kualitatif	Pemerintah Daerah Kota Porbolonggo masih perlu membuat kebijakan alternatif sebagai solusi dalam pengelolaan Pasar Baru di Kota Porbolonggo. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kota Porbolonggo dalam pengelolaan sudah dilakukan dengan baik untuk pembangunan fisik dan non fisik.
2	Camelia (Camelia, Deli Anhar 2021)	Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Dalam Penataan Pasar Tradisional	2021	Heinz Eulau dan Kneth Prewitt	Kualitatif, deskriptif	Sasaran Kebijakan adalah acuan atau pegangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang didasarkan pada kepentingan

		Pada Pasar Cempaka Kota BanjarBaru				utama terhadap sistem-sistem yang menentukan pencapaian kebijakan.
3.	Aptria Ansam Luthfi.AE (Luthfia 2023)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Di Kota Pekanbaru.	2023	Edward III	Deskriptif Kualitatif	dapat kita simpulkan bahwa jika pasar Tradisional dilakukan penataan dengan baik maka akan memiliki dampak yang besar tidak hanya peningkatan PAD saja namun pedagang-pedagang tradisonalpun merasa diperhatikan keberadaanya sehingga mereka mampu menjualkan dagangnya dengan kondisi pasar yang nyaman dan tertata ,tidak hanya pedagang namun seluruh masyarakat juga akan merasa lebih baik berbelanja ke pasar Tradisional dibandingkan kepada Pasar Modern yang jelas harganya lebih mahal diabndingkan dengan Pasar Tradisional. Pada dasarnya hanya mengubah konsep pasar Tradisional yang dulunya

						terkesan kumuh menjadi Pasar Tradisional yang bersifat modern dan lebih kreatif.
4.	Yulio Astria Yudah Firnanda (Firnanda and Arif 2022)	Implementasi Kebijakan Pengeolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo	2022	Van Meter dan Van Horn	Kualitatif	Bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pasar rakyat di Pasar Sukodono dan diimplementasikan namun belum optimal secara keseluruhan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas ketika melakukan penelitian penulis merumuskan kerangka pemikiran sebagai dasar dalam penelitian ini, dalam melihat Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu).

Untuk mempermudah pembahasan penelitian dan memperjelas asumsi penelitian diatas maka peneliti membuat operasional variable berdasarkan teori dari George C. Edward dalam (Winarno, 2021:177) yang mendefinisikan Implementasi kebijakan Implementasi merupakan salah satu tahap kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika salah satu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan

itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu disisi lain jika kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Edward membuat empat variable yang saling berkaitan untuk menjawab persoalan mengenai implementasi diantaranya yaitu :

1. Komunikasi

Secara umum edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Karena menurut Edwards persyaratan utama untuk pelaksanaan implementasi kebijakan adalah harus mengetahui apa saja yang akan dilakukan. Tentu saja komunikasi yang diberikan harus bersifat akurat dan dapat dipahami.

2. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi inipun cenderung menjadi tidak efektif. Dengan begitu sumber-sumber dapat menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

3. Kecenderungan-kecenderungan (Sikap Pelaksana)

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi penting bagi pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana kebijakan memiliki respon yang positif terhadap suatu kebijakan tertentu maka hal tersebut merupakan sebuah signal dukungan yang kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan yang sebelumnya telah direncanakan oleh para pembuat rencana awal. Begitupun sebaliknya.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering dan bisa secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

2.3 Asumsi Dasar

1. Seperti yang sudah didefinisikan oleh para ahli yang ada bagian atas, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu langkah untuk membuat sebuah kebijakan bagi masyarakat. Implementasi harus dilakukan dengan tepat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena jika tidak begitu maka implementasi kebijakan akan mengalami kegagalan.
2. Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari konsep Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah dibentuk bertujuan untuk

penyeleenggaraan Otonomi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas serta merupakan penjabaran lebih lanjut lagi dari peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

3. Pasar Tradisional

Pasar Tradisional merupakan pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah maupun swasta yang terdiri dari bangunan kios-kios kecil, tenda, dan toko yang dikelola oleh pedagang kecil, menengah atau swasta. Yang dimana di pasar tradisional dapat terjadi proses tawar-menawar saat melakukan transaksinya.

2.4 Operasional Variabel

Oprasionalisasi variable Implementasi Kebijakan dalam peneltian ini didasarkan pada dimensi Model Implementasi Kebijakan dari George C. Edwards (1980) dalam (Winarno, 2021:177) sebagai berikut :

Tabel 2.2 Operasional Variabel

Variable	Indikator	SubIndikator
----------	-----------	--------------

Geroge C. Edwards (1980) dalam (Winarno 2021)	1. Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transmisi 2. Kejelasan 3. Konsistensi
	2. Sumber-sumber	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf 2. Informasi 3. Wewenang 4. Fasilitas
	3. Kecenderungan-kecenderungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan birokrat 2. Beberapa insentif
	4. Struktur Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP 2. Fragmentasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tiap penelitian memerlukan rencana, karena itu diperlukan suatu tipe atau desain dalam sebuah penelitian, tipe penelitian merupakan suatu rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisa data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta dengan tujuan penelitian ini.

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulisan mengarahkan penelitian ini pada penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut (Sugiyono 2017) metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah; dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Makna merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak (Sugiono(2019) 2021)

3.2 Instrumen Penelitian

Dalam Penelitian Kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya tertjun kelapangan. Validasi pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh memahami metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data menilai kualitas data, analisis menafsirkan data dan membuat kesimpulan temuannya.(Sugiyono 2017)

Nasution(1998) dalam (Sugiyono 2017) Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama, alasannya ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

3.3 Unit Analisis dan Key Informan

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait langsung dengan Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu)

Tabel 3. 1 Key Informan

No	Keterangan	Jumlah
	Kepala Dinas Koperasi, UKM Perdagangan, dan Perindustrian	1
	Kepala Pasar Baru Indramayu	1
	Pedagang Pasar Baru Indramayu	5

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Teknik wawancara, observasi langsung dan dokumentasi, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Teknik wawancara

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan baik tentang informasi yang diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. (Sugiyono 2017)

2. Teknik Observasi

Nasution (1998) dalam (Sugiyono, 2017:106) mengatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Marshall (1995) dalam (Sugiyono, 2017:106) menyatakan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, atau peraturan kebijakan. Dokumen berbentuk gambar misalnya foto, gambar, hidup, dan sketsa lainnya. (Sugiyono, 2017:124)

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis dapat diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. (Sugiyono, 2017:131)

3.6 Rencana Pengajuan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data yang dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pengujian validitas dan realibilitas pada penelitian kualitatif yaitu dengan validitas internal, validitas eksternal, reabilitas dan obyektivitas.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.7.1 Lokasi Penelitian

Penelitian tersebut di lakukan pada Pasar Baru Indramayu dengan waktu penelitian 3 bulan mulai dari Juni 2024 sampai Agustus 2024.

3.7.2 Jadwal Penelitian

Tabel 3. 2 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2024						
		Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
1.	Studi Pendahuluan							
2.	Penyusunan Usulan Penelitian (UP)							
3.	Seminar Proposal							
4.	Pelaksanaan Penelitian							
5.	Pengolahan Dan Analisi Data							
6.	Penyusunan Hasil Penelitian							
7.	Bimbingan dan Konsultasi							
8.	Sidang Skripsi							

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

3.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Indramayu

A. Kondisi geografis

Kabupaten Indramayu merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Indramayu, Indramayu me jadi pusat pemerintahan, titik keramaian yang ad adi Indramayu terletak di Jatibarang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di tenggara, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Subang di barat. Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 Kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 313 desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan Indramayu, yang berada di Laut Jawa. Hari jadi Kabupaten Indramayu jatuh pada 7 Oktober 1527.

Indramayu dilintasi jalur pantura, yakni salah satu kalur terpadat di Pulau Jawa terutama pada musim mudik. Kabupaten ini juga dilintasi jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa, stasiun kereta api terbesar di Indramayu adalah Stasiun Jatibarang yang berada di Jatibarannng, sekitar 19km di selatan kota Indramayu. Beberapa wilayah-wilayah penting yang ada di Kabupaten Indramayu

diantaranya adalah Indramayu, Jatibarang, Haurgeulis, dan Kraangampel.

B. Demografi Kabupaten Indramayu

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, jumlah penduduk kabupaten Indramayu persemester I tahun 2023 sebanyak 1.920.505 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 965.942 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 954.581 jiwa.

C. Topografi

Topografi Berdasarkan topografinya ketinggian wilayah pada umumnya berkisar antara 0 – 18 m diatas permukaan laut dan wilayah dataran rendahnya berkisar antara 0 – 6 m di atas permukaan laut berupa rawa, tambak, sawah,pekarangan. Kabupaten Indramayu sebagian besar permukaan tanahnya berupa dataran dengan kemiringan antara 0% – 2% seluas 201.285 ha (96,03%) dari total wilayah. Keadaan ini terpengaruh terhadap drainase, bila curah hujan tinggi maka daerah-daerah tertentu akan terjadi genangan air dan bila musim kemarau akan mengakibatkan kekeringan

Iklim dan Curah Hujan Letak Kabupaten Indramayu yang membentang sepanjang posisi pantai utara pulau jawa membuat suhu udara di Kabupaten Indramayu cukup tinggi berkisar antara 22.9 – 30 C. Tipe iklim di Indramayu termasuk iklim tropis,

menurut klasifikasi schmidt dan ferguson termasuk iklim tipe D (iklim sedang) dengan karakteristik iklim antara lain:

1. Suhu udara harian berkisar antara 22,9°-30° dengan suhu udara tertinggi 32 C dan terendah 22 C
2. Kelembaban udara antara 70-80%
3. Curah hujan sepanjang tahun 2011 adalah sebesar 1.287 mm dengan hari hujan 80 hari.
4. Curah hujan tertinggi sekitar 1287 mm dan jumlah hari hujan sebanyak 80 hari yang terjadi dikecamatan Sindang dan Pasekan sedangkan curah hujan terendah sekitar 538 mm dengan jumlah hari hujan 54 hari terjadi di kecamatan Patrol.
5. Angin barat dan angin timur tertiup secara bergantian setiap 5-6 bulan sekali.

Hidrologi Secara hidrologi sumber air yang terdapat di Kabupaten Indramayu meliputi air permukaan dan air tanah. Air permukaan berupa sungai dan air genangan yang merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) sedangkan air tanah tertekan yang dieksploitasi melalui sumur-sumur pompa. Kabupaten Indramayu merupakan daerah hilir dari aliran sungai yang sangat potensial sebagai sumber air bagi kebutuhan masyarakat baik untuk pertanian, industri maupun bahan baku air bersih. Daerah Aliran Sungai tersebut yaitu Cipunegara, Cipancuh, Sewo, Mang Setan, Bugel, Legok, Eretan, Cilet, Tuan, Cilalanang, Cipanas, Cipondoh,

Cibelerang, Pangkalan, Semak, Maja, Rambatan, Cimanuk, Kelolo, Prawiro, Darung, Gebang, Sawit, Glayem, Kamal, Sigedang, Bobos, Oyoran, Pamengkang, Cimanis, dan Kumpulkuistas.

D. Visi dan Misi

Visi

1. Bersih Pemerintahan yang Tulus, Ikhlas, dan Suci. Transparan dalam Pengelolaan dan Penataan Pemerintahan.
2. Religius Nilai-nilai Agama mendasari setiap sikap dan perilaku dalam pengelolaan Pemerintah yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat atas terciptanya kebijakan pemerintahan dan aktivitas masyarakat.
3. Maju diartikan bahwa masyarakat Indramayu, cerdas, terampil, bergerak, dinamis, keratif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang kecil, angka harapan hidup yang tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik dan produktifitas semakin tinggi.
4. Adil diartikan bahwa masyarakat Indramayu, cerdas, terampil, bergerak, dinamis, keratif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang kecil, angka harapan hidup yang tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik dan produktifitas semakin tinggi.

5. Makmur , cerdas, terampil, bergerak, dinamis, keratif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang kecil, angka harapan hidup yang tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik dan produktifitas semakin tinggi.
6. Hebat , cerdas, terampil, bergerak, dinamis, keratif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang kecil, angka harapan hidup yang tinggi dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik dan produktifitas semakin tinggi.

Misi :

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang melayani, melindungi, bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme, transparan, akuntabel, dan professional demokratis.
2. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama, kepercayaan, pemahaman dan pengalaman agama serta kerukunan hidup antar umat beragama dan budaya dalam Bhineka Tunggal Ika.
3. Terpenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan merata.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang layak sebagai upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sumber daya sehingga mampu berdikari.

5. Peningkatan pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
6. Peningkatan pelaksanaan pembangunan disegala bidang sehingga terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara adil dan merata
7. Mewujudkan Indramayu sebagai daerah yang unggul dan memiliki daya saing melalui kemandirian ekonomi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri pertanian, perikanan dan migas

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

Dinas memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indramayu merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada mula terbentuknya Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu merupakan gabungan dari beberapa dinas. Pada tahun 1994 awal terbentuknya Dinas Pengelolaan Pasar. Pada tahun 2001 Dinas Pengelolaan Pasar dilebur dengan Dinas Perindustrian dan perdagangan (Disperindag), tahun 2009 Disperindag bergabung dengan Dinas Koperasi UKM, sehingga menjadi Dinas

Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan(Diskopindag). Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017 Diskopindag berubah menjadi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu (Diskopdagin) sesuai dengan Perda Kab. Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabuapten Indramayu.

Seiring dengan dinamika perkembangan dan adanya penataan kelembagaan baru Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, sesuai dengan Perda Kabupaten Indramayu Nomor tahun 2021, struktur dan ketugasan Diskopdagin Kab. Indramayu juga mengalami penyesuaian rincian tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu tertuang dalam Peraturan Bupati No. 8 Tahun 2022.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu berlokasi di Jl. MT. Haryono, No. 11/B Sindang, Indramayu.

A. Kedudukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Indramayu yaitu :

1. Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Peindustrian.
2. Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu adalah :

“Terwujudnya Iklim Usaha yang sehat, kondusif dan mandiri di Bidang Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.”

C. Misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Perekonomian, peran kelembagaan, iklim usaha dan pelayanan prima dalam Bidang Koperasi;
2. Meningkatkan Perekonomian, peran kelembagaan, iklim usaha dan pelayanan prima dalam Bidang UKM;
3. Meningkatkan Perekonomian, peran kelembagaan, iklim usaha dan pelayanan prima dalam bidang Industri ;
4. Meningkatkan Perekonomian, peran kelembagaan, iklim usaha dan pelayanan prima dalam bidang Perdagangan.

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu dibentuk berdasarkan amanat Peraturan

Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu. Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut maka diterbitkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor : 8 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

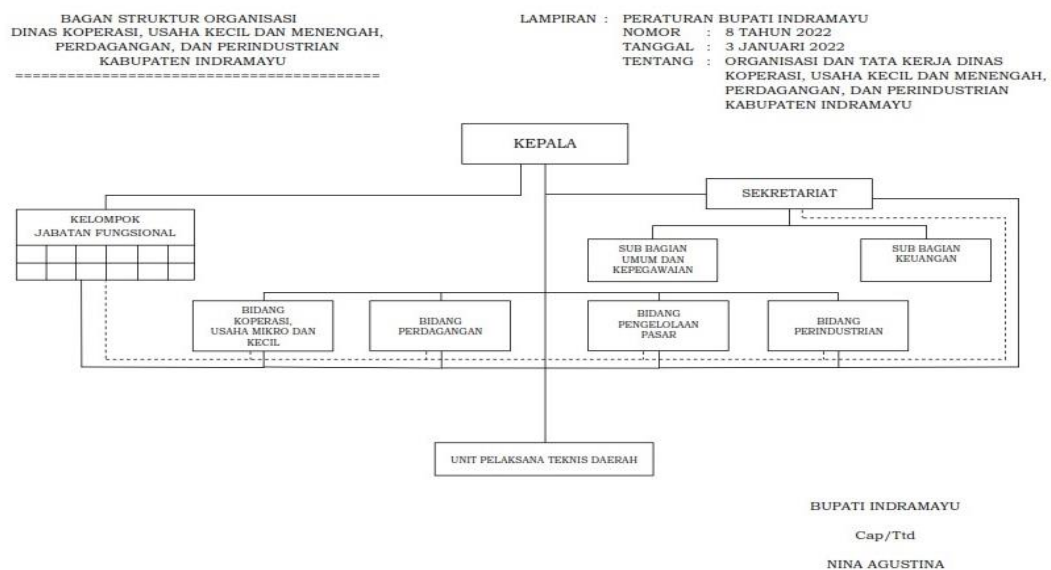
E. Tugas

Memiliki tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

F. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, dan perindustrian;
- e. pelaksanaan pengelolaan UPTD;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya
- g. Bidang Perindustrian, membawahkan :
- Kelompok Substansi Agro dan Makanan;
 - Kelompok Substansi Logam, Mesin, Elektronika, dan Sandang;
 - Kelompok Substansi Kimia, Kayu, dan Bahan Bangunan.
- h. UPTD.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu

G. Data Pegawai Menurut Golongan Ruang/Kepangkatan

Tabel 4.1 Data Jumlah Pegawai menurut Golongan/Ruang Kepangkatan

No	Kepangkatan	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV/e	Pembina Utama	0
2	IV/d	Pembina Utama Madya	0
3	IV/c	Pembina Utama Muda	1
4	IV/b	Pembina Tingkat 1	1
5	IV/a	Pembina	1
6	III/d	Penata Tingkat 1	7
7	III/c	Penata	9
8	III/b	Penata Muda Tingkat 1	13
9	III/a	Penata Muda	11
10	II/d	Pengatur Tingkat 1	58
11	II/c	Pengatur	37
12	II/b	Pengatur Muda Tingkat 1	4
13	II/a	Pengatur Muda	5
14	I/d	Juru Tingkat 1	1
15	I/c	Juru	1
16	I/b	Juru Muda Tingkat 1	0
17	I/a	Juru Muda	0
Jumlah			149

Sumber : Sub Bagian Umum Diskopdagin Kab. Indramayu, Agustus 2022

Sedangkan dari segi Gender, sumber daya aparatur Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan perindustrian Kabupaten Indramayu terinci sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
1	Laki – Laki	122	82
2	Perempuan	27	18
Jumlah		149	100

H. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Sebagaimana tertuang pada RPJMD 2021-2026 Kabupaten Indramayu, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu menetapkan Program-program sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- c. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro
- g. Program Pengembangan Umkm

- h. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- i. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- j. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- k. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- l. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
- m. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota
- n. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

I. Keadaan Sarana dan Prasarana Kantor

Sarana dan prasarana yang ada saat ini digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang pelaksanaan operasional kegiatan. Adapun keadaan sarana dan prasarana perlengkapan kantor yang ada saat ini berupa:

Kantor ada 1 unit:

Kantor berada pada alamat Jl. MT. Haryono No. 11/B Sindang, Kec. Sindang Kab. Indramayu Kode Pos. 45222 Jawa Barat - Indonesia. Kantor terdiri dari 3 Gedung.

Dinas Kopedagin Kab. Indramayu memiliki sarana penunjang berupa kendaraan operasional sejumlah:

- a. Kendaraan Roda 2 (dua) sebanyak 46 Unit
- b. Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 12 unit

4.1.3 Gambaran Umum Pasar Baru Daerah Indramayu

Pasar Baru Indramayu adalah salah satu pasar tradisional yang cukup terkenal di Kabupaten Indramayu. Pasar ini menjadi pusat perdagangan utama bagi masyarakat sekitar, menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan pangan, produk segar, hingga barang-barang rumah tangga. Pasar ini didirikan pada tahun 1993 silam. Berlokasi di Jalan Tanjung Pura, Karangmalang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Pasar Baru Daerah Indramayu memiliki luas tanah 20.000 m² dan luas bangunan 12.000 m².

Pasar Indramayu memiliki beberapa fasilitas diantaranya; Area Pedagang terdapat banyak kios dan lapak yang menjual berbagai macam barang, termasuk sayuran, buah-buahan, daging, ikan, rempah-rempah, dan produk lokal lainnya. Tempat Makan Pasar ini juga memiliki beberapa warung makan dan jajanan yang menyajikan kuliner lokal. Parkir Tersedia area parkir bagi pengunjung yang membawa kendaraan pribadi.

Jam Operasional, pasar Baru Indramayu biasanya buka setiap hari, mulai pagi hari hingga sore hari. Jam operasional dapat bervariasi tergantung pada hari dan kegiatan pasar. Komoditas unggulan bahan Pangan seperti sayuran segar, buah-buahan, daging, ikan, dan produk pertanian lainnya. Produk lokal barang-barang kerajinan tangan, oleh-oleh khas Indramayu, dan produk-produk lokal lainnya. Kuliner jajanan pasar dan makanan tradisional yang khas dari daerah setempat.

Pasar Baru Indramayu menawarkan pengalaman berbelanja yang otentik dengan suasana pasar tradisional yang ramai dan penuh warna. Selain sebagai tempat berbelanja, pasar ini juga berfungsi sebagai pusat interaksi sosial bagi penduduk setempat. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti banyak pasar tradisional lainnya, Pasar Baru Indramayu mungkin menghadapi tantangan terkait kebersihan, manajemen sampah, dan kebutuhan untuk pemeliharaan infrastruktur. Peran Ekonomi dan Sosial pasar Baru Indramayu memainkan peran penting dalam perekonomian lokal dengan memberikan peluang usaha bagi para pedagang dan penyedia barang. Selain itu, pasar ini juga berfungsi sebagai pusat sosial bagi masyarakat untuk bertemu dan berinteraksi. Perlunya engembangan masa depan seperti upaya untuk meningkatkan fasilitas dan kebersihan pasar dapat menjadi fokus utama untuk memastikan Pasar Baru Indramayu tetap relevan dan nyaman bagi pengunjung dan pedagang.

A. Tingkat Keaktifan Pedagang

1. Pedagang Kios : 667 Kios
 - a) Aktif : 443 Kios
 - 164 Aktif retribusi
 - 319 Tidak aktif retribusi
 - b) Pasif/Tutup : 421 Kios
2. Pedagang Los : 315 Kios
 - a) Aktif : 229 Los

- 140 Los Aktif retribusi
- 89 Tidak Aktif Retribusi
- b) Pasif/Tutup : 86 Los
- 3. Pedagang Pelataran : 120 aktif

B. Kebersihan dan Kemanan

- a) Petugas Kebersihan : 9 Orang
- Luas Daerah yang disapu : 8000 M²
- Jumlah honor yang diterima : Rp. 1000.000.- Rp. 1.950.000
- Kebutuhan ideal jumlah petugas kebersihan : 12 orang
- Standar upah minimum regional (UMR) : Rp. 2.623.679-
- b) Petugas Keamanan : 5 orang
- Luas daerah yang dijaga : 8000 m²
- Kebutuhan ideal jumlah petugas kebersihan : 12 orang
- Standar upah minimum regional (UMR) : Rp. 2.623.679-

C. Fasilitas/ Sarana Prasarana

Table 4.3 Jumlah Sarana Prasarana di Pasar Baru Indramayu

No	Fasilitas/ Sarana Prasana	Jumlah
1.	Jumlah Kios	670 kios
	Jumlah Los	315
	Jumlah Pelataran	120
	MCK	3 Unit
	Tempat Pembuangan Sampah (TPS)	1
	Tempat Parkir	Ada

4.1.4 Gambaran Umum Hasil Penelitian

Pemerintah Daerah berupaya melindungi pasar tradisional dari dampak negatif pusat perbelanjaan toko modern yaitu menetapkan kebijakan yang dapat melindungi pasar tradisional agar tidak tergeser oleh toko modern dan pusat perbelanjaan besar, seperti yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Pasal 11 No 4 yang berisi mengenai Supermarket dan Departement store dapat dibangun dengan jarak minimal 1000 m (seribu meter) dari pasar tradisional. Lalu untuk upaya pemberdayaan pasar tradisional sendiri terdapat program dari Bupati Indramayu yaitu berupa Kruw-Cil (Kredit Usaha Warung Kecil) yaitu sebuah program yang memberikan kredit kepada warung kecil dan UMKM untuk mendorong perekonomian melalui kerjasama dengan Bank yang ada di Daerah. Kredit diberikan mulai dari Rp 500.000,- hingga Rp 5000.000. Dalam aspek penataan Pemerintah Daerah Indramayu sendiri saat ini sedang berupaya untuk membangun bangunan yang baru agar para pedagang yang ada di pasar baru dapat direlokasi ke bangunan yang lebih layak. Namun pembangunan masih belum rampung sepenuhnya hanya 30% dan ditargetkan menyelesaikan semuanya di tahun 2026. Baru sekitar 226 toko yang sudah jadi sehingga relokasi belum dapat dilakukan. Lalu untuk perbaikan infrastruktur yaitu diupayakan meningkatkan fasilitas pasar dari segi keamanan, kebersihan dan kenyamanan bagi pengunjung dan pedagang. Selain itu proses relokasi pasar juga bertujuan untuk penataan agar pasar lebih terorganisir dan mudah diakses oleh

pengunjung dan lalu dari situ diharapkan dapat menghidupkan kembali kondisi pasar menjadi lebih ramai pengunjung. Sistem kebersihan di Pasar Baru Indramayu yaitu bekerjasama dengan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) yang menyediakan truk penagangkut sampah yang standby di TPS. Selain itu dalam aspek pengendalian, seperti yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Pasal 1 Nomor 28 yang berisi bahwa pengendalian adalah upaya pemerintah daerah untuk mengatur, mengawasi, dan mengendalikan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengendalian sendiri merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan dan proses dalam wilayahnya berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya peraturan tersebut pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern dapat menjadi solusi agar pasar tradisional tetap lestari dan berkembang. Serta dapat menciptakan persaingan ekonomi yang sehat.

3.2 Pembahasan

4.2.1 Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu).

Implementasi kebijakan menurut George C. Edwards dalam (Winarno, 2021:177) Implementasi merupakan salah satu tahap kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika salah satu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu disisi lain jika kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Implementasi sering memerlukan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan kebijakan dijalankan dengan efektif. Untuk melaksanakan kebijakan, diperlukan sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas. Manajemen sumber daya yang efisien adalah kunci untuk keberhasilan implementasi kebijakan. Selama implementasi, penting untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi hasil dari kebijakan. Ini membantu mengidentifikasi masalah dan mengukur sejauh mana kebijakan mencapai tujuannya. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, mungkin perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan atau metode implementasinya. Penyesuaian ini bertujuan untuk

meningkatkan efektivitas dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul.

Berikut pada bab ini berisi tentang temuan penelitian Implementasi Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Studi kasus di Pasar Baru Indramayu). Pembahasan ini berisis data dan fakta yang diperoleh dari penelitian dilapangan yang akan disesuaikan dengan 4 indikator Komunikasi(transmisi, kejelasan, konsistensi,) , sumber-sumber (staf, informasi, wewenang), kecenderungan-kecenderungan(pengangkatan birokrat dan insentif), struktur birokrasi (SOP dan Fragmentasi).

1. Komunikasi

Secara umum edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Karena menurut Edwards persyaratan utama untuk pelaksanaan implementasi kebijakan adalah harus mengetahui apa saja yang akan dilakukan. Tentu saja komunikasi yang diberikan harus bersifat akurat dan dapat dipahami.

- a. Transmisi dalam model implementasi Edward III merupakan bagaimana kebijakan dikomunikasikan dan arahkan yang awalnya dari pembuatan kepada pelaksanaan, serta bagaimana

memastikan bahwa informasi dan instruksi kebijakan sampai ke pihak yang tepat dan diterima dengan cara yang memungkinkan implementasi yang efektif .

Menurut wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Tradisional, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

Komunikasi yang terjadi dari Kepala Bidang Pengelolaan Pasar kepada Kepala Pasar. Saling berkomunikasi terkait kebijakan atau peraturan yang akan dilaksanakan. Jika ada masalah yang terjadi di Pasar maka Kepala Pasar yang akan langsung turun tangan untuk melakukan tanggung jawabnya dan jika komunikasi tidak berjalan dengan baik hingga dapat menimbulkan keributan maka Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Tradisional turut andil dalam memberikan solusi dan juga arahan dan menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi.

Wawancara dengan Kepala Pasar Baru Indramayu, Bapak Ratija dalam membahas mengenai komunikasi dan kordinasi yang terjadi oleh Kepala Dinas dan juga Kepala Pasar dalam implementasi kebijakan.

Kepala Pasar sebenarnya hanya sebagai kepanjangan tangan dari Dinas sehingga apapun yang diarahkan dari pusatnya maka semaksimal mungkin kami laksanakan arahan tersebut dan juga kami sebagai pengelola pasar ini turut serta melibatkan para pedagang untuk bisa andil dalam proses pengelolaan ini yang adapun nantinya kebijakan baru kami selalu mencoba infromasikan kepada pasar pedagang dan sebagai kepala pasar saya sendiri sudah mencoba mendorong dan memberi banyak masukan kepada dinas terkait untuk terus membangun pasar menjadi lebih baik lagi agar menjadi perekonomian rakyat yang baik. Selain itu saya sebagai kepala pasar juga sering menghimbau kepada para pedagang di pasar baru ini terkait aliran listrik agar tetap aman, lalu terkait kebersihan saya juga sering menghimbau untuk selalu dijaga.

Wawancara dengan Ketua Ikatan Pedagang Pasar (IPP), Bapak Warsono.

Walaupun Kepala Pasar baru menjabat selama 8 bulan sudah terjalin komunikasi yang cukup baik, beberapa keluhan pedagang juga sudah ada yang ditangani seperti masalah irigasi, namun komunikasi dari Pemerintah Daerah tidak terjalin komunikasi yang baik serta kurangnya perlindungan dari Pemerintah Daerah. Seharusnya pasar baru ini mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Daerah karena letaknya yang berada di pusat kota dan bisa menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, namun hingga saat ini belum dampak yang baik dari pemerintah daerah setempat untuk pasar ini. Hanya unjungan yang dilakukan sering namun tidak adanya tindakan apapun yang bertujuan untuk membangun pasar ini menjadi lebih baik lagi

Analisis dari hasil wawancara diatas adalah komunikasi yang terjalin antara kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Kepala Pasar serta antar pedagang menunjukkan adanya sistem komunikasi yang cukup baik. Namun perlu ditingkatkan lagi komunikasinya agar keluhan-keluhan para pedagang yang lain dapat teratasi secara merata karena ada beberapa pedagang yang merasa jika kurangnya komunikasi dengan Kepala Pasar sehingga apa yang mereka keluhkan tidak terdengar. Selain itu Kepala Pasar yang memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan dalam penerapan kebijakannya sangat memerlukan juga dukungan dari Pemerintah Daerah. Ketua IPP (Ikatan Pedagang Pasar) sangat mengharapkan mengenai perhatian lebih dari Pemerintah Daerah dan tindakan yang tepat untuk memperbaiki kondisi pasar karena tindakan dari pemerintah daerah sangat penting untuk

kemajuan pasar sendiri. Apalagi saat Pasar Baru Indramayu ini letaknya di tengah kota sehingga jika Pasar ini dapat berkembang baik lagi maka dapat menjadi pusat perekonomian yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi antar pihak sangat penting untuk kebaikan bersama dan perhatian pemerintah daerah sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup para pedagang yang mata pencahariannya bergantung di Pasar Baru Indramayu tersebut.

- b. Konsistensi adalah salah satu variable penting dari model implementasi Edward III karena dari konsistensi dapat memastikan kebijakan yang akan diterapkan bisa menjadi terstruktur dengan baik. Jika konsistensi tidak berjalan dengan baik maka dipastikan hasil yang diharapkan tidak tercapai.

Dari wawancara bersama Kepala Bidang Pengelolaan Pasar di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

Dari hasil wawancara

Untuk menjaga kekonsistensian dalam penerapan kebijakan biasanya dilakukan dokumentasi untuk memastikan setiap proses pelaksanaan kebijakan berjalan baik, lalu menerapkan SOP yang jelas dan terperinci untuk setiap aspek pengelolaan pasar yang harus dapat diikuti semua pihak yang terlibat, disamping itu melakukan pengawasan secara berkala untuk memastikan kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan yang terakhir yaitu mengevaluasi

hasil kinerja apakah kebijakan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hasil wawancara dengan Ketua IPP, Bapak Warsono

Setiap kebijakan yang berlaku semuanya memang konsisten dan sudah tertuang dalam aturan yang ada, namun pada penerapannya lah yang jauh dari kata konsisten masih banyak yang hal-hal yang tidak teratasi dengan baik. Sehingga implementasi kebijakan yang harusnya memberikan dampak baik bagi para pedagang pasar khususnya Pasar Baru Indramayu tidak terjadi. Sangat disayangkan memang, kita sebagai pedagang hanya berharap perhatian Pemerintah Daerah sendiri untuk pasar ini bisa diberikan lebih lagi dan dapat memberikan dampak yang baik bagi para pedagang. Lalu untuk komunikasi bersama pedagang sendiri di pasar baru ini dibentuk sebuah forum yang rutin diadakan setiap 10 hari sekali dan karena kebetulan karena saya sendiri yang menjabat sebagai ketua IPP nya maka komunikasi dan keluhan dari para pedagang saya tampung lalu saya sampaikan lagi kepada Kepala Pasar.

Hasil analisis dari wawancara diatas yaitu, untuk dapat meningkatkan hasil implementasi kebijakan sangat penting untuk terus memantau dan memperbaiki prosedur dokumentasi dan SOP agar tetap relevan dengan kebutuhan. Selain itu, pengawasan yang konsisten dan evaluasi kinerja yang teratur harus dipertahankan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi masalah dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan menerapkan praktik-praktik ini secara berkelanjutan, konsistensi dalam implemetasi kebijakan dapat terjaga serta meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil yang diharapkan. Namun disisi lain menurut analisis saya kekonsistenan Pemerintah Daerah dalam menangani

permasalahan yang ada di Pasar masih belum cukup baik karena kenyataannya di lapangan masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum teratasi sepenuhnya, seperti penertiban bangunan liar, pemeliharaan fasilitas, dan pemeliharaan kebersihan yang hingga kini masih menjadi permasalahan yang terus terjadi di pasar. Kebijakan yang ada untuk pasar memang sudah dirancang dengan cukup baik dan sesuai aturan namun dalam praktiknya penerapannya belum konsisten dan efektif. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya dampak positif pada para pedagang di Pasar Baru Indramayu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan perhatian dan tindakan yang lebih serius dari Pemerintah Daerah. Upaya untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan dan memberikan dukungan yang memadai kepada pasar akan sangat membantu dalam mencapai tujuan yang diinginkan dan meningkatkan kondisi bagi para pedagang.

- c. Kejelasan adalah salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Kejelasan mengarah pada sejauh mana kebijakannya dan intruksi terkait dapat disampaikan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Tradisional Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

Untuk memberikan instruksi yang jelas dilakukan bersama-sama dengan seluruh pihak yang terlibat dan membuat rencana dengan langkah-langkah yang spesifik dari tujuan kebijakannya. Lalu setelah semua rencana yang dilakukan sudah tersusun dengan baik maka dilakukan sosialisasi kepada para pedagang mengenai adanya kebijakan yang akan berlaku. Lalu dilakukan juga komunikasi yang terbuka antara pengelola dan juga pedagang terkait masalah ataupun masukan untuk pasar tersendiri

Dari wawancara dengan Kepala Pasar Baru Daerah Indramayu mengenai kejelasan dari implementasi kebijakannya.

Kebijakan menetapkan bahwa kami, sebagai pengelola pasar, bertanggung jawab atas manajemen operasional sehari-hari, termasuk pemeliharaan fasilitas, dan penataan pedagang dan menjelaskan setiap adanya perubahan kebijakan yang baru. Kami juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pedagang mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk standar kebersihan dan keselamatan pangan. Kebijakan memberi kami wewenang untuk melakukan inspeksi rutin dan menindak pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dari wawancara bersama Ketua Ikatan Pedagang Pasar (IPP) Bapak Warsono.

Selama ini belum ada bentuk apapun pemberdayaan kepada para pedagang dan penerapan dari kebijakannya pun sangat kurang. Ketika terjadi penurunan penjualan pun hingga saat ini pemerintah daerah tidak melakukan tindakan yang betul-betul membantu untuk keadaan pasar yang sudah mulai sepi. Rencana pemindahan pasar pun masih harus membutuhkan waktu 3 tahun lagi jadi tidak ada solusi apapun untuk memperbaiki keadaan pasar saat ini. Namun hingga saat ini kami para pedagang masih terus menunggu dan mencoba mendorong komunikasi lebih instentif lagi dengan pemerintah

daerah agar pasar yang letaknya di pusta kota ini kembali ramai dikunjungi oleh pembeli.

Analisis dari wawancara diatas yaitu keterlibatan antar pihak terkait dalam proses perencanaan dan memberikan ruang untuk komunikasi terbuka membantu dalam memperjelas kebijakan dan menangani masalah atau masukan yang mungkin saja bisa timbul. Secara keseluruhan kejelasan dalam implementasi kebijakan memerlukan perencanaan yang matang, komunikasi yang efektif dan penegakan aturan yang konsisten. Langkah-langkah yang diambil oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar dan Kepala Pasar menunjukkan upaya agar kebijakan yang diterapkan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Namun meskipun kebijakan mungkin jelas dalam hal teori rencana keadaan dan kondisi di lapangan tentu bisa saja berbeda seperti yang terjadi di Pasar Baru Indramayu yaitu kurangnya pemberdayaan pedagang, ketidakpastian mengenai tindakan pemerintah dan jangka waktu pemindahan pasar ke bangunan yang baru membutuhkan waktu yang masih lama, menunjukkan bahwa ada kekurangan dalam implementasi kebijakan. Dari sisi pedagang belum mendapat dukungan penuh untuk mengatasi penurunan penjualan dan masalah lainnya seperti kondisi pasar yang sudah mulai tidak kokoh, pedagang liar yang masih berdiri di sekitar pasar walaupun

sebagian sudah dilakukan penggusuran namun sebagian lagi belum.

2. Sumber-sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten. Tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implelementasi inipun cenderung menjadi tidak efektif. Dengan begitu sumber-sumber dapat menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

a. Staf

Sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini mengartikan bahwa tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pegawai pemerintah ataupun staf , namun disisi lain kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang cukup sulit meyangkut implementasi kebijakan yang efektif.

Menurut wawancara bersama dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Tradisional di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

“Saat ini di bidang pengelolaan pasar sendiri sedang mengalami kekosongan jabatan untuk staf, hanya ada seksi

bagian perencanaan pembangunan dan dibantu dengan anak pkl atau magang ketika pelaksanaan tugasnya”

Sedangkan hasil wawancara bersama Kepala Pasar, Bapak Ratija

Di pasar Baru Indramayu sendiri saya menjalankan tugas dibantu oleh beberapa petugas, yang terbagi menjadi 3 bagian yaitu petugas pemungut retribusi, petugas keamanan, dan petugas kebersihan. Petugas Pemungut retribusi sendiri berjumlah 6, petugas keamanan 7, dan petugas kebersihan berjumlah 10. Serta tata usaha 3 orang mereka menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Sebetulnya petugas keamanan sendiri dari kami hanya berjumlah 4 orang karena keterbatasan uang gaji yang harus dibayarkan. Namun dari IPP berinisiatif menambah petugas keamanan 3 orang lagi sehingga menjadi bertambah 7 orang.

Hasil analisis dari penjelasan diatas yaitu untuk setiap pelaksanaan kebijakan yang efektif tidak hanya staf jumlah staf yang penting namun juga kualitas dan kecakapan mereka dalam menjalankan tugasnya. Staf yang tidak memiliki keterampilan ataupun kekurangan pengalaman dapat menghambat implementasi kebijakan. Kekosongan jabatan disuatu bidang juga menjadi salah satu permasalahan dalam menerapkan kebijakan, karena jika kekurangan staf yang berpengalaman maka implementasi kebijakan menjadi kurang maksimal. Lalu untuk Pasar Baru Indramayu sendiri dengan pembagian tugas yang jelas namun pelaksanaannya harus ditingkatkan lagi apalagi seperti keamanan dan kebersihan karena di beberapa titik yang ada di Pasar Daerah Indramayu masih ada yang kumuh dengan tumpukan sampah dan juga

dari segi keamanan perlu ditingkatkan lagi agar pedagang dan pembeli merasa aman dan nyaman saat berada di area pasar.

- b. Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempunyai dua bentuk. Pertama, informasi mengenai bagaimana melaksanakan suatu kebijakan dengan demikian para pelaksana kebijakan harus diberikan arahan untuk melaksanakannya. Yang kedua, informasi merupakan data mengenai kedisilinan anggota terhadap peraturan-peraturan pemerintah.

Wawancara bersama Kepala Bidang Pengelolaan Pasar di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

“Untuk memastikan informasi yang disampaikan tidak terjadi kesalahan yaitu biasanya dilakukan pengawasan serta evaluasi rutin, membuka forum diskusi, membuat komunikasi terbuka antara para pedagang dan juga staf atau pegawai dinas. Lalu melakukan tindak lanjut dan evaluasi kembali jika terjadi adanya keluhan dari para pedagang”

Hasil wawancara bersama Bapak Ratija, Kepala Pasar Baru Daerah Indramayu.

“Informasi yang disampaikan dari pusat biasanya akan disampaikan juga langsung kepada para pedagang melalui ketua Ikatan Pedagang Pasar (IPP) dengan membuat forum pertemuan sekaligus berdiskusi bersama-sama di kantor pasar. Namun karena tempat yang terbatas biasanya yang hadir dalam diskusi hanya perwakilannya saja”

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas yaitu informasi yang tepat dan akurat adalah hal penting untuk

implementasi kebijakan yang berhasil. Informasi tentang cara melaksanakan kebijakan diterapkan dengan benar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Namun disisi lain karena di Pasar Baru Indramayu memiliki keterbatasan tempat dalam forum disukusi pedagang dapat menghambat penyampaian informasi secara menyeluruh. Meskipun ketua IPP memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi, keterbatasan partisipasi langsung dapat memepengaruhi efektivitas komunikasi. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi saat ini sangat diperlukan agar penyampaian infromasi memiliki cakupan yang lebih luas untuk pedagag. Seperti pembuatan grup di salah satu aplikasi Whatsapp sehingga para pedagang dapat bertukar informasi memalui grup tersebut.

- c. Wewenang menjadi salah satu sumber yang penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Wewenang akan menjadi berbeda-beda dari satu program ke program lainnya serta memiliki beberapa bentuk yang berbeda.

Dari wawancara bersama Kepala Bidang Pengelolaan Pasar di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

“Wewenang dari dinas sendiri yaitu mengatur pengelolaan pasar seperti kebersihan, keamanan, pengawasan kinerja dari setiap kepala pasar, PAD(Pendapatan Asli Daerah), serta mengawasi pengelolaan keuangan yang di kelola oleh pengurus pasar. Serta menampung permasalahan-permasalahan yang terjadi di pasar”

Menurut wawancara dengan Kepala Pasar mengenai wewenang yang dapat dilakukan sebagai Kepala Pasar.

“Kewenangan pengelola pasar yaitu PAD (Pendapatan Asli Daerah) berkaitan dengan fasilitas yang sudah diberikan seperti kios dan pelataran yang setiap hari ada penarikan retribusi yang nantinya retribusi tersebut digunakan untuk mengelola segala kebutuhan yang diperlukan”

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut yaitu dengan adanya wewenang tersebut baik ditingkat dinas ataupun kepala pasar dapat mendukung pengelolaan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi. Pengelolaan yang efektif memerlukan pembagian wewenang yang jelas agar setiap pihak memahami perannya dan menjalankan tugas dengan baik. Serta untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar penting untuk memperjelas dan mendokumentasikan setiap wewenang disetiap tingkat organisasi. Koordinasi antara pihak yang memiliki wewenang tingkat dinas dan kepala pasar harus diatur dengan baik dan komunikasi yang jelas dan efektif juga perlu dibangun untuk menangani permasalahan dan memanfaatkan wewenang secara optimal. Selain itu jika wewenang dapat dilakukan dengan baik maka akan dapat dengan mudah mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan memastikan bahwa kebijakan diterapkan dengan efektif.

d. Fasilitas

Fasilitas fisik dapat menjadi peran penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Karena seorang pelaksana mungkin mempunyai staf yang memadai, mungkin memahami apa yang harus dilakukan dan mungkin memiliki wewenang untuk melakukan tugasnya, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa perbekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan gagal.

Menurut wawancara dengan Kepala Pasar mengenai wewenang yang dapat dilakukan sebagai Kepala Pasar.

“Di Pasar Baru Indramayu ini tersedia beberapa fasilitas penunjang yang mencakup sarana kebersihan seperti gerobak sampah, sistem drainase, sarana keamanan.”

Menurut wawancara dengan Pedagang Sembako di Pasar Baru Indramayu, Ibu Tina

“Komunikasi yang terjalin dengan Kepala Pasar Kurang Baik dan kurang mendengar aspirasi para pedagang. Banyak masalah-masalah yang ada di Pasar tidak dapat teratasi seperti penertiban pedagang-pedagang liar, kondisi bangunan yang tidak kunjung diperbaiki.

Lalu menurut wawancara dari pedagang lain Bapak H. Udin selaku pedagang plastik di pasar Baru Daerah Indramayu.

Dari dulu sampai sekarang kondisi pasar tidak pernah ada perubahan yang signifikan, bahkan banyak fasilitas dan infrastruktur yang rusak tapi belum diperbaiki. Jalan yang seharusnya di aspal keseluruhan namun hanya di beberapa

titik tertentu saja. Lalu atap-atap bangunan yang sudah mulai keropos banyak yang belum perbaikan ditambah jika hujan akan bocor yang akibatnya di dalam pasar becek bikin tidak nyaman itu dampaknya jadi ke hasil penjualan. Banyak orang yang tidak masuk ke pasar jika becek. Sehingga kondisi pasar semakin memprihatinkan. Seharusnya banyak yang dibenahi di pasar ini agar pengunjung kembali berbondong-bondong untuk datang ke pasar dan pasar kembali ramai seperti dulu.

Hasil wawancara bersama pedagang, Bapak Karim.

Karena pasar baru ini usianya juga sudah lama jadi memang banyak fasilitas yang sudah tidak layak, hal tersebut memang sering dikeluhkan oleh para pedagang termasuk saya sendiri. Selama ini langkah pemerintah daerah untuk menangani masalah tersebut hanya rencana relokasi ke tempat baru itupun belum terlaksana baru sebagian yang sudah jadi. Tapi harapan kami untuk hal tersebut bisa terlaksana dan memberikan solusi terbaik untuk para pedagang

Analisi dari wawancara diatas yaitu mengenai pentingnya fasilitas fisik seperti bangunan yang layak dan perlengkapan pengelolaan sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan karena tanpanya fasilitas yang baik maka pelaksanaan kebijakan dapat mengalami hambatan bahkan kegagalan meskipun kebijakan yang dibuat sudah memadai. Fasilitas penunjang di Pasar Indramayu sendiri memang tersedia seperti kebersihan dan keamanan namun fasilitas yang ada tersebut jika tidak diimbangi dengan manajemen dan pemeliharaan yang baik maka tidak dapat berfungsi secara optimal. Keluhan dari para pedagang juga mengenai fasilitas yang tidak ditindak lanjuti seperti atap bocor, jalan yang rusak, drainase yang buruk serta tidak pedagang liar yang berdiri di

sekitar pasar. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa manajemen dan pemeliharaan operasional pasar tidak berjalan baik. Serta kondisi tersebut yang masih terus berlanjut tanpa adanya penanganan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi pengunjung dan pedagangnya sendiri. Secara keseluruhan untuk meningkatkan implementasi kebijakan dan kinerja pasar, diperlukan perhatian yang lebih pada manajemen fasilitas fisik komunikasi yang efektif antara pengelola pasar dan pedagang, serta respons yang cepat terhadap masalah infrastruktur yang ada. Namun disamping itu, Pemerintah Daerah memang perlu menerpakan kebijakannya sesuai dengan aturan yang ada tetapi seharusnya dari sisi pedagang pun memiliki kesadaran penuh untuk bersama-sama merawat fasilitas yang ada agar tetap terjaga dan bisa berfungsi dalam jangka panjang.

3. Kecenderungan-kecenderungan

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang memiliki konsekuensi penting bagi pelaksanaan implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana kebijakan memiliki respon yang positif terhadap suatu kebijakan tertentu maka hal tersebut merupakan sebuah signal dukungan yang kemungkinan besar mereka akan melaksanakan kebijakan yang

sebelumnya telah direncanakan oleh para pembuat rencana awal. Begitupun sebaliknya.

a. Pengangkatan Birokrat

Kecenderungan - kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Hanya yang menjadi persoalan adalah bila personil yang tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Pertimbangan-pertimbangan politik dalam pengangkatan pejabat tinggi akan menghambat implementasi kebijakan tersebut. Terlebih lagi jika kebijakan tersebut hanya untuk menampung kelompok-kelompok tertentu.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Tradisional Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

Di dalam bidang pengelolaan pasar tradisional sendiri memang sedang mengalami kekosongan beberapa bagian karena dari kementriannya sendiri belum membuka formasi pendaftaran untuk mengisi jabatan yang kosong ada disini. Dalam hal ini mungkin menimbulkan hambatan yang terjadi ketika ada tugas yang harus dilaksanakan karena kosongnya beberapa staf sehingga kita hanya mengandalkan pegawai atau staff yang tersedia untuk menjalankan setiap tugas yang diberikan oleh atasan.

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas yaitu kekosongan jabatan di bidang pengelolaan pasar tradisional

Kabupaten Indramayu menghambat pelaksanaan tugas yang efektif, jumlah staf yang terbatas memiliki potensi mengurangi kualitas dan kecepatan pelayanan, serta, menyulitkan pencapaian tujuann kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformasi dalam proses pengangkatan birokrasi agar lebih fokus pada kompetensi dan kapabilitas, bukan hanya pertimbangan politik. Ini akan membant meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan dan mengurangi kendala yang dihadapi saat pelaksanaan tugas.

b. Beberapa insentif

Mengubah personil dalam birokrasi pemerintah merupakan pekerjaan yang cukup sulit dan tidak selalu menjamin proses implementasi dapat berjalan lancar. Menurut Edwards, salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan pembentuk kebijakan tingkat tinggi kemungkinan besar memengaruhi tindakan-tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan-keuntungan atau biasa-biaya tertentu akan menjadi faktor pendorong kebijakan dapat terkaksana dengan baik.

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

Pemberian insentif disesuaikan dengan aturan yang ada dan didapat sesuai dengan golongan pangkat yang ada di ASN, sehingga itu semua sudah diatur dari pusat. Namun untuk insentif seperti keamanan pasar dan kebersihan pasar itu didapat dari pengambilan retribusi kepada para pedagang yang ada di pasar. Retribusi tersebut dikelola oleh Kepala Pasar beserta jajarannya untuk mengatur keuangan yang masuk dan keluar. Nanti uang tersebut digunakan untuk membayar anggota keamanan dan kebersihan yang bertugas.

Hasil wawancara bersama dengan Kepala Pasar, Bapak H. Ratija.

“Insentif yang didapat berasal dari retribusi, dari keamanan dibayar oleh pedagang sebanyak Rp 1.000, kebersihan 1.000, dan biaya retribusi 1.500. Hasil dari retribusi ada yang diberikan untuk PAD(Pendapatan Asli Daerah) dan untuk perbaikan fasilitas yang ada di pasar”

Kesimpulan dari wawancara tersebut adalah menggunakan insentif merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan motivasi dan kinerja pelaksana kebijakan di birokrasi pemerintah. Di Pasar Baru sendiri menerapkan retribusi dari pedagang pasar yang diperuntukan untuk membayar tenaga keamanan dan kebersihan menunjukkan cara yang praktis untuk mengelola insentif, sekaligus memastikan bahwa peran penting dalam pasar seperti keamanan dan kebersihan tetap terjaga. Meskipun insentif berperan menjadi

pendorong yang efektif pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan standar yang telah ditetapkan untuk memastikan keberhasilan dan keadilan dalam implementasi kebijakan. Namun dari penarikan retribusi tersebut para pedagang masih belum puas dengan hasilnya yang tidak sesuai karena masih ada beberapa titik tempat masih terlihat kotor dan kumuh. Tetapi hal tersebut tidak dapat menyalahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan, karena dari pedagangnya sendiri terkadang masih berkebiasaan buruk yaitu membuang sampah secara sembarangan, seperti sampah sisa sayuran atau sayuran busuk yang dibuang ditempat yang tidak seharusnya sehingga menimbulkan kondisi yang semakin kotor. Hal tersebut juga harus menjadi perhatian bagi pengelola pasar untuk memberikan teguran dan arahan kepada pedagang yang melanggar, lalu dari hal tersebut bisa menyadarkan para pedagang tentang pentingnya menjaga kebersihan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering dan bisa secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

a. SOP

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Salah satu dari aspek prosedur kerja ukuran dasarnya *Standar Operasional Procedures* (SOP). Prosedur-prosedur ini diharapkan dapat menangani keadaan-keadaan umum digunakan dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan SOP para pelaksana kebijakan dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu SOP juga menjadi menyamakan segala tindakan para pejabat organisasi yang kompleks dan menyebar luas yang akhirnya dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan memiliki kesamaan besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Menurut wawancara bersama Kepala Bidang Pengelolaan Pasar di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

“Setiap tugas yang dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku serta menyesuaikan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan tugas yang diarahkan”

Kesimpulan dari wawancara diatas atas yaitu implementasi kebijakan yang efektif dengan adanya SOP, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan dengan cara yang konsisten dan sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan. Hal tersebut dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau penyimpangan.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa SOP merupakan salah satu aspek yang memiliki peran penting dalam memastikan implementasi dan konsistensi kebijakan serta dapat berguna untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dalam organisasi. Seperti yang terjadi di Pasar Baru Indramayu, staf yang ada bekerja sesuai dengan SOP nya. Petugas kebersihan yang melakukan tugasnya yaitu membersihkan dan mengawasi kebersihan 10 blok yang ada di pasar baru ini. Lalu petugas keamanan yang bertugas berjaga di beberapa titik pasar yaitu di pintu masuk dan pintu keluar. Walaupun penerapannya masih kurang maksimal tapi tugas dari mereka sudah cukup membantu para pedagang tinggal bagaimana para pedagangnya juga bersama-sama memiliki kesadaran untuk saling menjaga kebersihan dan kondisi yang kondusif di pasar sehingga para pembeli juga dapat merasa aman dan nyaman ketika berad di lingkungan pasar.

b. Fragmentasi

Fragmentasi merujuk pada masalah atau tantangan yang muncul ketika suatu kebijakan atau program diimplementasikan secara tidak konsisten atau terpecah-pecah. Teori implementasi

Edwards 3 menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan dan perumusan kebijakan yang baik, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dan diterapkan di lapangan. mencerminkan ketidakselarasan atau ketidakharmonisan dalam proses penerapan kebijakan, yang bisa mengurangi efektivitas dan efisiensi kebijakan tersebut. Mengatasi fragmentasi biasanya memerlukan upaya koordinasi yang lebih baik, komunikasi yang efektif, dan pengelolaan sumber daya yang terpadu.

Dari wawancara bersama Kepala Bidang Pengelolaan Pasar di Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu.

Terkadang saat merumuskan kebijakan bisa saja terjadi perbedaan pendapat dan bisa menimbulkan konflik internal. Karena didalam perumusan masalah melibatkan beberapa pihak yang tidak semuanya memiliki tujuan yang sama sehingga konflik terkadang tidak bisa dihindarkan. Namun disamping itu kita bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut dan mencari titik tengah agar permasalahan yang terjadi tidak menghambat pembuatan kebijakan ataupun penerapannya nanti. Dan hal itu juga menjadi tantangan untuk saya sendiri dalam menjalankan tugas ini.

Dari wawancara menurut Kepala Pasar Baru Indramayu, Bapak Ratija.

“Jelas sekali kami pernah mengalami perbedaan pendapat karena yang namanya perumusan suatu kebijakan diisi oleh banyak orang sehingga semua tidak memiliki pikiran yang

sama, namun kami tetap melakukan tugas sesuai dengan tujuan dan fungsi yang ada untuk kepentingan bersama”

Hasil analisis dari wawancara diatas yaitu perumusan kebijakan mungkin saja memiliki tujuan yang berbeda karena banyaknya pihak yang terlibat. Konflik internal akan muncul akibat perbedaan pendapat. Meskipun adanya upaya untuk mencari jalan keluar dan titik tengah, perbedaan pendapat menjadi tantangan tersendiri yang harus dapat diatasi untuk dapat memastikan kebijakannya agar dapat diterapkan dengan efektif. Untuk mengatasi hal tersebut memerlukan koordinasi yang lebih baik antara semua pihak yang terlibat serta upaya untuk menyelaraskan tujuan dan pandangan dalam proses kebijakan. Dengan memperbaiki koordinasi dan komunikasi efektivitas dan efisiensi implementasi dapat menjadi lebih baik.

4.2.2 Faktor penghambat implementasi kebijakan Peraturan Daerah Pemerintah Daerah Indramayu nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan No 7 Tahun 11 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan, Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan yang pertama kurang pahamnya pedagang dalam memahami aturan, kurang pahamnya pedagang dalam menciptakan rasa nyaman dan aman. Banyak pedagang yang tidak memelihara kondisi pasar dengan baik seperti menjadikan koridor jalan sebagai tempat berjualan hal itu berdampak pada mobilitas. Jalan yang seharusnya dapat dilalui

dengan leluasa malah menjadi sempit dan mobilitas terganggu sehingga banyak pembeli yang malas untuk memasuki area pasar. Hal tersebut berdampak pada hasil penjualan. Lalu pedagang yang mendirikan bangunan ditempat yang bukan peruntukannya, seperti di area jalan depan dan aera depan sekitar pasar hal tersebut membuat kondisi pasar semrawut, ditambah lagi oknum pedagang yang tidak tertib dalam pengelolaan sampah sisa jualan, mereka membuang sampah seperti sayur atau buah yang sudah tidak layak ke tempat yang bukan seharusnya. Pengelola sendiri sudah mencoba memberikan solusi untuk menghimbau para pedagang untuk bersama-sama merawat dan menjaga kondisi pasar menjadi aman dan nyaman namun yang terjadi terkadang pedagang masih lalai dalam hal tersebut. Faktor yang kedua yaitu anggaran, anggaran yang dibutuhkan tidak dapat membutuhkan waktu dan tahapan yang memakan waktu. Sehingga jika adanya keluhan mengenai perbaikan fasilitas tidak dapat ditangani dengan cepat. Berkaitan dengan pemeliharaan untuk pasar baru indramayu sendiri, anggaran yang akan diperlukan membutuhkan waktu hingga 1 tahun lamanya baru dapat di alokasikan. Karena dalam anggaran tersebut juga terdapat skala prioritas dan juga jumlah yang terbatas sehingga tidak semua keluhan belum dapat teratasi. Seperti koordinasi mengenai sampah bekerjasama dengan DLH, dan jika untuk pembangunan tps dianggarkan melalui DLH, dari pihak pengelola pasar yang menyampaikan kebutuhan seperti pembangunan TPS. Lalu terkait

juga dengan relokasi pedagang ke bangunan yang baru juga terhambat dikarenakan pada saat tahap pembangunan di tahun 2022 silam, anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk beberapa pembangunan namun karena pada saat itu sedang terjadi pandemi covid-19 maka beberapa anggaran dipangkas untuk dialihkan ke sektor kesehatan. Namun saat ini pihak pengelola pasar sudah mencoba berkordinasi kembali bersama dinas untuk kembali melanjutkan pembangunan pasar yang baru. Namun proses relokasi juga masih menuai pro dan kontra dari pedagangnya sendiri, karena menurut sebagian pedagang bangunan fisik yang baru lebih kecil daripada bangunan yang lama jadi terlihat lebih sempit. Mereka lebih berharap bangunan baru saja yang diperbaiki daripada harus pindah. Dalam menyikapi hal tersebut pengelola pasar sudah mencoba melakukan sosialisasi dan penyuluhan bersama para pedagang agar ketika proses pembangunan sudah rampung tidak menimbulkan konflik dan polemik baru. . Serta kesinergian antara pengelola dan pedagang juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi. Pengelola memiliki kewajiban untuk menerapkan implementasi sebaik-baiknya dan pedagang juga memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah Indramayu telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk pasar tradisional pemberdayaan UMKM melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur jarak pembangunan pusat tradisional serta program kredit untuk warung kecil dan UMKM. Selain itu, pemerintah berupaya menata dan meningkatkan infrastruktur pasar dengan membangun fasilitas baru dan meningkatkan kebersihan serta kenyamanan pasar.
2. Implementasi kebijakan pasar baru Indramayu menghadapi beberapa kendala utama. Pertama yaitu ketidakpahaman di antara pedagang mengenai aturan dan pentingnya menciptakan kondisi pasar yang nyaman dan aman yang berdampak pada masalah seperti penempatan barang yang tidak sesuai, oknum pedagang yang tidak tertib dalam menjaga kebersihan area pasar, faktor anggaran yang menjadi hambatan proses pembangunan fisik pasar yang baru. Upaya pengelolaan pasar juga dilakukan untuk menanggapi hal tersebut.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan dan upaya yang dilakukan bertujuan untuk menciptakan persaingan ekonomi yang sehat dan melindungi pasar tradisional, keberhasilan implementasi memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah untuk penanganan terhadap

berbagai kendala yang ada, termasuk peningkatan koordinasi, sumber daya dan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat.

5.2 Saran

1. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, pengelola pasar, dan para pedagang. Pembuatan forum komunikasi rutin dapat membantu menyelesaikan masalah secara cepat dan memastikan keluhan serta aspirasi pedagang ditangani dengan baik
2. Pemerintah Daerah perlu memastikan anggaran yang lebih baik dapat membantu pasar. Peninjauan dan perencanaan anggaran yang lebih baik dapat membantu mempercepat penyelesaian pembangunan dan perbaikan infrastruktur pasar.
3. Peningkatan sosialisasi mengenai kebijakan baru dan peraturan dan manfaat relokasi serta penataan dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan dari pedagang.
4. Pemantauan dan penegakan peraturan harus lebih ditegaskan lagi khususnya dalam penataan dan penggunaan lahan. Pengawasan secara berkala dan tindakan tegas bagi pelanggaran dapat mengurangi masalah pendirian bangunan di area yang tidak sesuai.
5. Rencana Perbaikan yang terperinci dengan langkah-langkah yang jelas, memfokuskan perbaikan pada jalan yang rusak dan fasilitas penting lainnya.

6. Melakukan evaluasi dan pengawasan berkala untuk memastikan hasil yang sesuai.
7. Mengadakan program pelatihan bagi pedagang, mengenai manajemen usaha sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan ,mereka terhadap regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bangswan, Prof Hi. Satria. 2017. *MANAJEMEN PEMASARAN DSN REVITALISASI PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL*.

Purwanto, Erwan Agus, and Sulistyastuti/ Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono, Prof Dr. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Edited by Sofiya Yustiyani Suryandari. CV, Alfabeta.

Winarno, Prof. Drs. Budi. 2021. *Kebijakan Publik(Teori , Proses, Dan Studi Kasus)*. Edited by Tri Admojo. CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

Kasmad, Rulinawaty. 2017. “Studi Implementasi Kebijakan Publik.” *Jurnal Sains Dan Seni ITS* 6 (1):

ti51–66. Pramono, Joko. 2020. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*.

UNDANG-UNDANG

Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/11997.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/11997.

JURNAL

Camelia, Deli Anhar, Junaidy. 2021. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PELAYANAN PUBLIK DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL

PADA PASAR CEMPAKA KOTA BANJARBARU.”

DEVY PRAMUDIANA, IKA. 2017. “Perubahan Perilaku Konsumtif Masyarakat

Dari Pasar Tradisional Ke Pasar Modern.” *Asketik* 1 (1): 35–43.

<https://doi.org/10.30762/ask.v1i1.409>.

Firnanda, Yulio Astria Yudha, and Lukman Arif. 2022. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Pada Pasar Sukodono Kabupaten Sidoarjo."

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 22 (2): 1089.

<https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i2.2293>.

Ii, B A B. 2020. "UNIKOM_Miftahul Fadjri_BAB II," 1–7.

Luthfia, Aptria Anisma. 2023. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Di Kota Pekanbaru," 1–11.

Maulidin, Alifia, Siti Marwiyah, and Avita Khoirunnafiyah. 2021. "KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO" 1 (7).

MRizky, Aminudin. 2020." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

Panjaitan, J., Adam, A., & Lubis. 2022. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila Dikota Medan Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK)." *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 4(1): 1–8.

<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/17215%0Ahttps://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/17215/2/178510043> - Jefri S Panjaitan - Fulltext.pdf.

Purwanto, Erwan Agus, and Sulistyastuti/ Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava

Media.

Rahma, Sinta. 2017. “Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional.” *Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional* 3 (112): 3. <http://e-journal.uajy.ac.id/11423/3/TA142382.pdf>.

Rusham. 2016. “Analisis Dampak Pertumbuhan Pasar Moderen Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kabupaten Bekasi.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Dan Kewirausahaan “Optimal”* 10 (2): 153–66.

SANTOSO, THERESIA MERLYN. 2017. “Pasar Tradisional, Pasar Johar Semarang, Revitalisasi, Arsitektur Indische, Icon/LandmarkNo Title.”

Sudedi, Rasmandi. 2022. “Ngeri! Pasar Baru Indramayu Rawan Ambruk.” *Detik Jabar*, 2022.

Sugiono(2019). 2021. “Analisis Perubahan Hemodinamik.” *Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta*, 34–50.

Sugiyono, Prof Dr. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Edited by Sofiya Yustiyani Suryandari. CV, Alfabeta.

Winarno, Prof. Drs. Budi. 2021. *Kebijakan Publik(Teori , Proses, Dan Studi Kasus)*. Edited by Tri Admojo. CAPS (Center Of Academic Publishing Service).

SUMBER LAINNYA

Mangga, Blogger. 2021. “Nama-Nama Pasar Tradisional Di Indramayu.” Blogger Mangga. 2021. <https://www.bloggermangga.com/2021/02/nama-nama-pasar-tradisional-di-indramayu.htm>
 Sekilas Indramayu.” 2024. 2024. <https://indramayukab.go.id/sekilas-indramayu/>.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Kepala Dinas Koperasi, UKM Perdagangan, dan Perindustrian

Pedoman Wawancara

Informan :

Jabatan :

Tanggal :

Pukul :

- 1) Indikator : Komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi)
 1. Bagaimana komunikasi yang terjalin antara Dinas, Kepala Pasar, dan Pedagang dalam?
 2. Bagaimana proses penyampaian informasi mengenai kebijakan agar tidak terjadi kesalahan dari Pemerintah Daerah sendiri hingga sampai ke Pedagang?
 3. Bagaimana anda memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan disebarluaskan dengan efektif dan mencapai semua pihak yang relevan?
 4. Bagaimana mekanisme pemberian instruksi kepada para pedagang agar dapat tersampaikan dengan baik?
 5. Apakah terdapat instruksi yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan di lapangan? Bagaimana memastikan bahwa instruksi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh seluruh staf dan pedagang?
 6. Apakah ada mekanisme untuk mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi jika ditemukan ketidak konsistenan dalam informasi yang disampaikan?
 7. Bagaimana anda memastikan bahwa kebijakan pengelolaan pasar yang

diterapkan di lapangan konsisten dengan kebijakan yang telah di rumuskan?

2) Indikator : Sumber-sumber(Staf, Informasi, wewenang, fasilitas)

1. Bagaimana peran staf yang ada dalam proses implementasi kebijakannya?
2. Bagaimana proses penyampaian informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam saat penerapan kebijakannya?
3. Apa saja yang menjadi wewenang Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam implementasi kebijakan?
4. Fasilitas penunjang apa saja yang menjadi faktor pendukung terjadinya implementasi kebijakan?

3) Indikator Kecenderungan-kecenderungan(Pengangkatan birokrat dan insentif)

1. Bagaimana Anda mengatasi kemungkinan ketidakadilan atau ketidakpuasan yang mungkin timbul dari sistem insentif di pasar tradisional?
2. Bagaimana Anda memastikan bahwa insentif yang diberikan sesuai dengan tujuan kebijakan pasar dan tidak menciptakan konflik kepentingan atau dampak negatif lainnya?
3. Bagaimana Anda mengevaluasi dan menyesuaikan sistem insentif berdasarkan umpan balik dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan?

- 4) Struktur Birokrasi (SOP, Fragmentasi)
 1. Bagaimana Anda memastikan bahwa SOP yang ada di pasar tradisional sesuai dengan kebijakan yang diterapkan?
 2. Bagaimana Anda memastikan bahwa seluruh staf di pasar tradisional memahami dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan?
 3. Bagaimana struktur organisasi pasar tradisional mempengaruhi pelaksanaan SOP, dan apa langkah-langkah yang Anda ambil untuk memastikan bahwa struktur tersebut mendukung penerapan SOP yang efektif?
 4. Apa dampak dari fragmentasi terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan yang diterapkan berdasarkan model ini?
 5. Bagaimana menghadapi tantangan dalam menghadapi perbedaan pendapat pada saat mengimplementasikan kebijakan?

Kepala Pasar Baru Indramayu

Pedoman Wawancara

Informan :

Jabatan :

Tanggal :

Pukul :

- 1) Indikator : Komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi)

Bagaimana proses penyampaian informasi mengenai kebijakan agar tidak terjadi kesalahan dari Pemerintah Daerah sendiri hingga sampai ke Pedagang?

Bagaimana anda memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan disebarluaskan dengan efektif dan mencapai semua pihak yang relevan?

Bagaimana mekanisme pemberian instruksi kepada para pedagang agar dapat tersampaikan dengan baik?

Kejelasan

Apakah terdapat instruksi yang jelas untuk pelaksanaan kebijakan di lapangan? Bagaimana memastikan bahwa instruksi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh seluruh staf dan pedagang?

Konsistensi

Apakah ada mekanisme untuk mengevaluasi dan memperbaiki komunikasi jika ditemukan ketidak konsistenan dalam informasi yang disampaikan?

Bagaimana anda memastikan bahwa kebijakan pengelolaan pasar yang diterapkan di lapangan konsisten dengan kebijakan yang telah dirumuskan?

- 2) Indikator : Sumber-sumber(Staf, Informasi, wewenang, fasilitas)
1. Bagaimana peran staf yang ada dalam proses implementasi kebijakannya?
 2. Bagaimana proses penyampaian informasi agar tidak terjadi kesalahan dalam saat penerapan kebijakannya?
 3. Apa saja yang menjadi wewenang Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam implementasi kebijakan?
 4. Fasilitas penunjang apa saja yang menjadi faktor pendukung terjadinya implementasi kebijakan?
- 3) Indikator Kecenderungan-kecenderungan(Pengangkatan birokrat dan insentif)
4. Bagaimana Anda mengatasi kemungkinan ketidakadilan atau ketidakpuasan yang mungkin timbul dari sistem insentif di pasar tradisional?
 5. Bagaimana Anda memastikan bahwa insentif yang diberikan sesuai dengan tujuan kebijakan pasar dan tidak menciptakan konflik kepentingan atau dampak negatif lainnya?
 6. Bagaimana Anda mengevaluasi dan menyesuaikan sistem insentif berdasarkan umpan balik dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan.

PEDOMAN WAWANCARA

Pedagang Pasar

Pedoman Wawancara

Informan :

Jabatan :

Tanggal :

Pukul :

- 1) Apakah terjalin komunikasi yang baik antara Kepala Pasar dan para pedagang di Pasar Baru Indramayu?
- 2) Apakah adanya sosialisasi atau arahan untuk pemberdayaan para pedagang?
- 3) Apakah implementasi dari Kebijakan Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berjalan dengan baik?
- 4) Bagaimana kondisi ekonomi Pasar Baru Indramayu saat ini?
- 5) Komunikasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait perlindungan, pemberdayaan, dan penataan untuk Pasar ini?
- 6) Bagaimana kondisi pasar saat ini?
- 7) Apakah Anda merasa ada kejelasan mengenai pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan ini?



1. IDENTITAS PRIBADI

- a. Nama : Deni Agustina
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 10 Agustus 2001
- d. NPM : 652010120005
- e. Agama : Islam
- f. Status : Belum Kawin
- g. Alamat : Ds. Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener,
Kabupaten Indramayu
- h. No.Hp : 085 797 288 968
- i. Email : deniagustina08@gmail.com

2. RIWAYAT PENDIDIKAN

- a. SDN Karang Anyar 2 : 200
- b. SMPN 2 Sindang : 2014-17
- c. SMAN 1 Indramayu : 2017-2020
- d. Universitas Wiralodra : 2020 – 2024



UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
TERAKREDITASI "B" SK BAN-PT NOMOR: 13764/SK/BAN-PT/AkPPJ/S/12022
Sekretariat: Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Indramayu 45212 Telp. (0234) 275272
website: <http://fisp.unwir.ac.id> email: fispunwirindramayu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU
NOMOR : 018i/SK.D/FISIP-UW/III/Q.2024
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wiralodra

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun Akademik 2023-2024 perlu menunjuk Dosen pembimbing skripsi bagi tiap mahasiswa.
- b. bahwa untuk keperluan pada butir 'a' tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan tentang Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa pada Tahun

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Program Studi : S1-Ilmu Pemerintahan
Nama Mahasiswa : Deni Agustina
NPM : 652010120005
Judul UP/Skripsi : Implemntasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten
Indramayu Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang
Perlindungan, Penghormatan, Pemanfaatan, Dan

6.	24-05-2024	Pembinaan No 1 dan 3		
7.	27-05-2024	Pembinaan No 1-3		
8.		Pembinaan		



UNIVERSITAS WIRALODRA INDRAMAYU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

TERAKREDITASI "B" SK BAN-PT NOMOR: 13764/SK/BAN-PT/AkPPJ/S/I/2022
Sekretariat: Jl. Ir. H. Djuanda Km. 3 Indramayu 45212 Telp. (0234) 275272
website: <http://fisip.unwir.ac.id> email: fisipunwirindramayu@gmail.com

Nomor : 043a/FISIP-UW/VI/N.2024
Lampiran : -
Perihal : *Ijin Penelitian*

Indramayu, 7 Juni 2024

Kepada Yth,

Kepala Bappeda – Litbang Kabupaten Indramayu
di- Indramayu.



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

JL. Let. Jend. S. Parman No. 15 Indramayu Kode Pos 45212, Jawa Barat
Telp. Fax. (0234) 271711 Website : <http://bapeda.indramayukab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 00.9.2/520.a/Litbang

1. Yang bertandatangan
dibawah ini

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA-

DOKUMENTASI PENELITIAN





Wawancara bersama pedagang pasar baru Indramyu



Wawancara bersama pedagang pasar baru Indramayu





Kondisi Pasar Baru Indramayu



Kondisi pasar baru indramayu